

FAKTOR – FAKTOR PENENTU KESUKSESAN (CRITICAL SUCCESS FACTORS) PADA KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA BIDANG INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Huakanala Hubudi¹, Husein Umar¹

¹Program Pascasarjana Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
huakanalaudi@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki permasalahan dalam bidang infrastruktur. Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan infrastruktur bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok negeri ini. Namun penyediaan pelayanan infrastruktur tersebut membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Keterlibatan sektor swasta memakai bentuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pembangunan pelayanan infrastruktur diharapkan tidak hanya mengisi celah kesenjangan dalam masalah pendanaan saja, tetapi juga dalam hal aspek penting lainnya, seperti; kemampuan managerial dan mengadopsi kemajuan teknologi baru. Untuk kerjasama ini diduga banyak permasalahan yang dihadapi antara lain faktor - faktor penentu kesuksesan/*critical success factors* (CSF) dan apakah faktor - faktor penentu kesuksesan sebagai suatu solusi. Kajian literatur digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang relevan untuk mendapatkan gambaran mengenai persepsi atas CSF. Kajian *literature* digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang relevan untuk mendapatkan gambaran mengenai persepsi atas CSF. Penelitian ini bertujuan untuk melaporkan hasil penelitian mengenai faktor - faktor penentu kesuksesan (*critical success factors / CSF*) dalam kerangka kerjasama pemerintah swasta. Pengujian persepsi ini menilai faktor yang menarik (positif) dan yang tidak menarik (negatif) dalam sistem pengadaan untuk proyek infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan survei dalam bentuk kuesioner yang dikirim melalui pos untuk mendapatkan data utama. Respon untuk data survei dianalisis secara deskriptif statistik dan dilanjutkan dengan faktor analisis. Kerjasama pemerintah swasta untuk proyek infrastruktur, mendapatkan persepsi yang paling menarik dalam bentuk faktor - faktor yang dianggap positif antara lain yaitu, teknologi pembangunan yang lebih baik, solusi anggaran dan transfer risiko, efisiensi pembiayaan sektor publik. Untuk faktor yang dianggap negatif yaitu; ekonomi biaya tinggi dan kurangnya pengalaman membuat Kerjasama pemerintah menjadi kurang menarik. Penelitian mendapatkan hasil mengenai persepsi tentang faktor - faktor penentu kesuksesan pada bidang infrastruktur di Indonesia. Faktor positif dan negatif yang diteliti dapat memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kata kunci : *Critical Success Factors*, Kerjasama Pemerintah Swasta, Analisis Faktor.

Abstract

Indonesia has many problems for providing infrastructure services. Government is obliged to provide access for all communities across the country, and provision of infrastructure services needed huge funding. The involvement of private sector use form of public private partnerships (PPP). PPP are long-term contractual arrangements that harness the skills and resources of both private and public sectors in the delivery of public services or the development of public infrastructure. Through these mutual partnerships, a number of advantages should accrue including access to capital, increased value for money, timely completion of and improved service delivery through the use of better management practises and adoption of innovative solutions. However, PPP will face the problems, which identified through critical success factors (CSF), and whether critical success factors CSF as a solution. Literature review is used to identify relevant factors, to gather their perception on CSF. The research aims to report the findings on what are the CSF into perceptions of what makes the PPP attractive or unattractive as a procurement system for infrastructure projects in the Indonesia. The research uses a postal survey questionnaire technique for primary data collection. Survey response data is subjected to

descriptive statistical analysis and subsequently to rotated factor analysis. PPP infrastructure project is perceived as most attractive in terms of positive factors relating to represent better technology development, budget solution and risk transfer, and cost efficiency of public sector. Negative aspects, relating to factors such as, high cost economy, and lack of experience by participants make PPP procurement less attractive. The research captures the perception about CSF on Indonesia Infrastructure in general. The positive and negative factors surrounding PPP procurement will provide a more informed basis for decision making.

Keywords : *Critical Success Factors, Private Public Partnerships, Factor analysis.*

Pendahuluan

Pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan infrastruktur (sarana dan prasarana) bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok negeri ini. Namun penyediaan pelayanan infrastruktur tersebut membutuhkan dana atau pendanaan yang sangat besar. Peranan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengisi kesenjangan pendanaan didalam pembangunan pelayanan infrastruktur. Pelibatan sektor swasta dalam pembangunan pelayanan infrastruktur diharapkan tidak hanya mengisi celah kesenjangan dalam masalah pendanaan saja, tetapi juga dalam hal aspek penting lainnya, seperti; kemampuan managerial dan mengadopsi kemajuan teknologi baru.

Peran sektor swasta didalam membangun gedung dan menata infrastruktur komersial tidak diragukan lagi. Sementara untuk membangun gedung dan infrastruktur non komersial yang merupakan bagian dari publik merupakan tugas pemerintah. Bidang infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi diantara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Pengembangan infrastruktur sumber daya air ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan penyediaan air untuk berbagai keperluan masyarakat, seperti air minum, pembangkit tenaga listrik dan pengendalian banjir yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PERPRES RI No. 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014, Memperkuat Pembangunan Antar Bidang, Buku II hlm.1.).

Demikian pula, infrastruktur lainnya, seperti jalan, jembatan, infrastruktur dasar permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonominya. Selain itu, diperlukan pula pengembangan

infrastruktur komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi baik untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, maupun sosial. Infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung daya saing ekonomi global terutama dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi lainnya.

Jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial juga merupakan bagian dari ruang publik yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antar kelompok masyarakat guna mengartikulasikan diri dan membangun ikatan sosial-budaya. Dalam konteks yang lebih luas, jaringan transportasi serta jaringan komunikasi dan informatika juga berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu entitas politik yang berdaulat, dan juga untuk menghadapi serangan terhadap ketahanan dan kedaulatan bangsa melalui media dunia maya yang saat ini semakin meningkat.

Fungsi infrastruktur sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat lain, serta peran jaringan komunikasi dan informatika yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat (*real time*) menembus batas ruang dan waktu. Peranannya sangat penting, baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Telekomunikasi, listrik, dan airpun merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Saat ini akses masyarakat kepada air minum baru 50%, pada tahun 2010 sudah harus 70%. Sanitasi baru mencapai 54%, ditahun 2014 harus sudah mencapai 100%. Sedangkan panjang

jalan baru 86.300 kilometer. Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur, tidak dengan hanya mengandalkan dana dari APBN tetapi juga perlu melibatkan swasta dalam mekanisme kerjasama pemerintah swasta/PPP (Harian Seputar Indonesia, 2010). Tahun 2010 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur mencapai Rp.511 triliun dan strategi melalui mekanisme kerjasama pemerintah swasta/PPP mencapai Rp.1.429 triliun (Harian Seputar Indonesia, 2010).

Hasil survei dari World Economic Forum yang berjudul Global Competitiveness Report 2008-2009 menunjukkan, kondisi infrastruktur di Indonesia menempati peringkat ke - 96 dari 134 negara (World Economic Forum, 2009, Global Competitiveness Report 2008-2009). Kendati agak membaik, Indonesia masih merupakan negara yang paling lemah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara dalam hal ketersediaan infrastruktur (lihat, table.1).

Tabel.1. Peringkat Kualitas Infrastruktur

Negara	Peringkat Kualitas Infrastruktur				
	Keseluruhan	Jalan	Rel Kereta	Pelabuhan	Bandar Udara
Indonesia	96	106	58	104	75
Malaysia	19	17	17	16	20
Thailand	35	32	48	48	28
Filipina	94	94	85	100	89

Sumber : World Economic Forum 2008 - 2009.

Penyediaan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian jika dilaksanakan melalui kompetisi secara terbuka, adil, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah akan mengurangi perannya sebagai penyedia keseluruhan layanan infrastruktur menjadi fasilitator atau *enabler* sarana dan prasarana yang sudah dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat (termasuk badan usaha swasta). Perubahan peran tersebut diwujudkan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, baik sektor maupun lintas sektor dengan membuka peluang penyediaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau yang dikenal dengan sebutan *Private Public Partnerships* (PPP) (Dedy S Priatna, 2009).

Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana tahun 2010 - 2014, diperkirakan total investasi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.429,3 Trilyun, yang didalamnya kemampuan pemerintah pusat dalam penyediaan pendanaannya hanya sekitar 35,75 persen dari total Kebutuhan (PERPRES RI No. 5 Tahun 2010 *ibid* hlm. 72). Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, dilakukan pengembangan KPS, privatisasi, tanggungjawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility*, serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini harus sejalan dengan visi, misi,

dan program aksi presiden terpilih untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui *dual track strategy*, yaitu membangun sarana dan prasarana yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi berupa pengembangan pusat kegiatan (kawasan) yang dapat menarik industri lanjutan untuk berinvestasi di Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, arah kebijakan dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPS adalah :

- a) Melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang - undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS,
- b) Mempersiapkan proyek KPS secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi yang tidak perlu, dan
- c) Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS, termasuk menyediakan dana pendukung didalam APBN.

Sedangkan strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

- (a) Membentuk jejaring dan meningkatkan kapasitas untuk mendorong perencanaan dan persiapan proyek KPS, melakukan promosi KPS, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau pelaksanaan KPS;

- (b) Membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan proyek KPS, seperti : fasilitasi dalam penyediaan tanah dan pendanaan seperti *Infrastructure funds* dan *guarantee funds*;
- (c) Mendorong terbentuknya regulator ekonomi sektoral yang adil dalam mewakili kepentingan pemerintah, badan usaha, dan konsumen;
- (d) Memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan proyek KPS secara efisien dan mengikat
- (e) Mempersiapkan proyek KPS yang akan ditawarkan secara matang melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel;
- (f) Memberi jaminan adanya sistem seleksi dan kompetisi yang adil, transparan, dan akuntabel;
- (g) Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana daerah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang didukung oleh kerangka insentif yang lebih baik.

Tabel.2. Jenis Kerjasama Pemerintah Swasta

<i>Types of PPPs</i>	<i>Acronym</i>	<i>Mode of Entry</i>	<i>Operation and Maintenance</i>	<i>Investment</i>	<i>Ultimate Ownership</i>	<i>Market Risk</i>	<i>Duration (Years)</i>
<i>Build, Own and Transfer</i>	BOT	<i>Greenfield</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Semi - Private</i>	<i>Private</i>	20-30
<i>Build, Own, Operate and Transfer</i>	BOOT	<i>Greenfield</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Semi - Private</i>	<i>Private</i>	30+
<i>Build, Own and Operate</i>	BOOT	<i>Greenfield</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	30+
<i>Build, Lease and Own</i>	BLO	<i>Greenfield</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	30+
<i>Partial Privatization</i>		<i>Divestiture</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	30+
<i>Full Privatization</i>		<i>Divestiture</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Indifinite</i>
<i>Rehabilitate, Operate and Transfer</i>	ROT	<i>Concession</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Public</i>	<i>Semi Private</i>	20-30
<i>Rehabilitate, Lease/Rent and Transfer</i>	RLRT	<i>Concession</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Public</i>	<i>More Private</i>	20-30
<i>Build,Rehabilitate, Operate and Transfer</i>	BROT	<i>Concession</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Public</i>	<i>Private</i>	20-30
<i>Management Contract</i>		<i>Contract</i>	<i>Private</i>	<i>Public</i>	<i>Public</i>	<i>Public</i>	3 to 5
<i>Leasing</i>		<i>Contract</i>	<i>Private</i>	<i>Public</i>	<i>Public</i>	<i>Semi Private</i>	8 to 15

Sumber : Thomsen (2005), OECD Secretariat World Bank PPI database and authors' assessment.

Marcus Jeffries (2006 : 452), menyatakan fungsi KPS dalam penyediaan infrastruktur sebagai berikut :

“PPP’s are a means of public sektor procurement using private sektor finance and best practice. PPPs can involve design, construction, financing, operation and maintenance of public infrastructure and facilities, or the operation of services, to meet public needs.”

Dalam pelaksanaan KPS sering timbul masalah, yang menyangkut tingginya biaya tender (*high cost in tendering*), negosiasi yang sulit (*complex negotiation*), perbedaan dan konflik pendapat yang timbul diantara pemangku kepentingan

(Akintoye, A., Beck, M., Cliff, H., Chinyio, E. and Asenova, D., 2001). Walaupun begitu banyak KPS yang sukses. Beberapa studi mengklasifikasikan daftar faktor - faktor penentu kesuksesan (*critical success factors/CSF*) dalam KPS. Parmenter (2010), menyatakan bahwa pembuatan kerangka kerja yang terintegrasi oleh pihak manajemen merupakan hal yang sangat penting. Laporan tersebut harus meliputi faktor - faktor penentu kesuksesan (CSF).

Critical success factors (CSF) merupakan *social support* (Frilet, M.,1997), *Commitment* (Stonhouse, J.H., Hudson, A.R., and O’Keefe, M.J.,

1996, Kanter, R.M, 1999); dan *mutual benefit* (Grant, T., 1996). Sedangkan Kopp (1997), Gentry dan Fernandez (1997). Arthur Andersen dan Enterprise LSE (2000), menekankan bahwa pentingnya transparansi, dan kompetitif dalam proses pengadaan barang/jasa (*procurement*) (Kopp, J.C, 1997 Arthur Andersen and Enterprise, LSE, 2000, http://www.treasury-projects-taskforce.gov.uk/series_I/Andersen/tech_contents.html). Berdasarkan latar belakang uraian tersebut di atas, merupakan latar belakang bagi penulis untuk mengadakan penelitian CSF, dengan penelitian ini akan didapatkan gambaran dan analisis mengenai faktor - faktor penentu kesuksesan (CSF) pada Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang infrastruktur di Indonesia.

Hipotesis Penelitian

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data ilmiah yang valid (Sugiyono, 2008). Desain penelitian merupakan suatu cetak biru (*blue print*) bagaimana data dikumpulkan, diukur, dan dianalisis. Melalui desain, dapat dikaji alokasi sumber daya yang dibutuhkan (Husein Umar, 2004). Desain penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu paparan pada variabel - variabel yang diteliti melibatkan data kualitatif dan data yang kuantitatif (Husein Umar, 2008). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Dalam survey, informasi dikumpulkan dari responden melalui kuesioner (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995). Kuesioner didesain berdasarkan informasi yang didapat didalam literatur penelitian

yang terdahulu (Hardcastle, C., Edwards, P.J., Akintoye, A.Q. And Li, B. 2002).

Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, studi ini dilakukan dengan dua cara metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur mengenai CSF. Dalam studi pustaka juga dipelajari berbagai artikel atau tulisan perorangan dan institusi yang berkaitan dengan CSF dan PPP yang diperoleh melalui buku-buku dan jurnal-jurnal internasional. Disamping itu studi ini juga melakukan kajian terbatas melalui situs-situs internet dan referensi lain yang berkaitan dengan CSF dan PPP di beberapa negara.

Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh masukan secara langsung dari praktisi di bidang infrastruktur yang dianggap dapat memberikan masukan mengenai model PPP di Indonesia.

Metode studi lapangan dalam studi ini dilakukan sebagai berikut :

1. Survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pelaksana, pembiayaan dan badan-badan pemerintah, terutama yang aktif pada kegiatan PPP. Tujuan penyebaran kuesioner adalah untuk melihat persepsi dan pemahaman terhadap variabel-variabel CSF, termasuk mengenai pemahaman, minat hingga kendala peraturan PPP.
2. Disamping itu juga dilakukan diskusi dengan para narasumber yang kompeten dan melakukan wawancara langsung dengan beberapa pihak terutama yang berhubungan langsung dalam kegiatan PPP.

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pengukuran berdasarkan skala Likert, dengan interval skala sebagai berikut (Sugiyono, 2008) :

- 1) Tidak penting
- 2) Cukup penting
- 3) Penting

- 4) Sangat Penting
- 5) Luar Biasa Penting

Metode dan Teknik Pengambilan Sampel

Sasaran survey adalah terbatas pada informasi yang tersedia bagi para pihak yang mempunyai pengalaman kerja dan yang tertarik pada PPP. Teknik *sampling* yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah *convenience sampling* (Akintoye et al, 2005) bukannya *random sampling*, karena di Indonesia PPP masih merupakan hal yang baru dan tidak ada *database* yang tersedia sebagai standarnya. *Convenience sampling* merupakan *sampling* yang cepat dilakukan dan murah bersifat non probabilitas. Peneliti memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang ditemui (Husein Umar, 2008). Untuk sampel yang diteliti antara lain : Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia bidang infrastruktur, utilitas dan transportasi, badan pemerintah (*agency*), konsultan, BUMN/BUMND.

Metode Analisis Data

Metode untuk melakukan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis faktor (*factor analysis*) dengan menggunakan program SPSS versi 17.0. Analisis faktor termasuk pada *interdependence technique* yang berarti tidak ada variabel dependen ataupun variabel independen, dimana data yang dianalisis berupa data numerik (Riyanto, 2009).

Proses analisis faktor mencoba menemukan hubungan (*interrelationships*) antar sejumlah variabel-variabel yang saling independen satu dengan yang lain. Sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Pada dasarnya tujuan analisis faktor adalah (Singih Santoso, 2010) :

1. *Data summarization*, yakni mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi atau *Q faktor analysis* yang dilakukan antar responden. Analisis ini dikenal juga sebagai *cluster analysis*.
2. *Data reduction*. Setelah melakukan korelasi, dilakukan proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu.

Analisis Faktor

Analisis faktor adalah dengan mengekstraksi sejumlah faktor bersama (*common factors*)

dari gugusan variabel asal X_1, X_2, \dots, X_p , sehingga :

- a. Banyaknya faktor lebih sedikit dari variabel asal X.
- b. Sebagian besar informasi variabel X, tersimpan dalam faktor

Faktor Bersama (*common factors*) :

- Misal Faktor Bermakna : F1 dan F2 (*eigen value* > 1)
- F1 = Faktor Solusi Anggaran
- F2 = Faktor Efisiensi Biaya
- X_1 sid X_4 secara bersama-sama mengandung F1 dan F2

Hal - hal yang berkaitan dengan Analisis Faktor :

1. Ragam Variabel Asal (X)

$$\text{Var}(X_i) = C_{i1}^2 + C_{i2}^2 + \dots + C_{ip}^2 + \varphi_i$$

$$\text{Var}(X_i) = h_i^2 + \varphi_i ; h_i^2 = \sum_j C_{ij}^2$$

Komponen disebut komunalitas (*communality*) menunjukkan proporsi ragam X yang dapat dijelaskan oleh p faktor bersama. Komponen merupakan proporsi ragam dari X yang disebabkan oleh faktor spesifik dan atau galat (*error*).

2. Faktor Bermakna

Faktor yang dipertimbangkan bermakna bila *eigen value* lebih besar satu atau ($\lambda \geq 1$)

3. Peragam antara X dengan F

Pembobot (*loading*) faktor :

- a. Digunakan untuk interpretasi faktor bermakna
- b. *Loading* besar merupakan penyusun terbesar dari suatu variabel
- c. Tanda (positif atau negatif) menunjukkan arah.

4. Rotasi Faktor

Variabel Sebelum Rotasi Sesudah Rotasi

	F1	F2	F1	F2
X1	0.40	0.70	0.02	0.86
X2	0.65	0.80	0.26	0.92

5. Skor Faktor

Matriks input Kovarians :

$$S - F_a = c' S^{-1} (X_j - \bar{X})$$

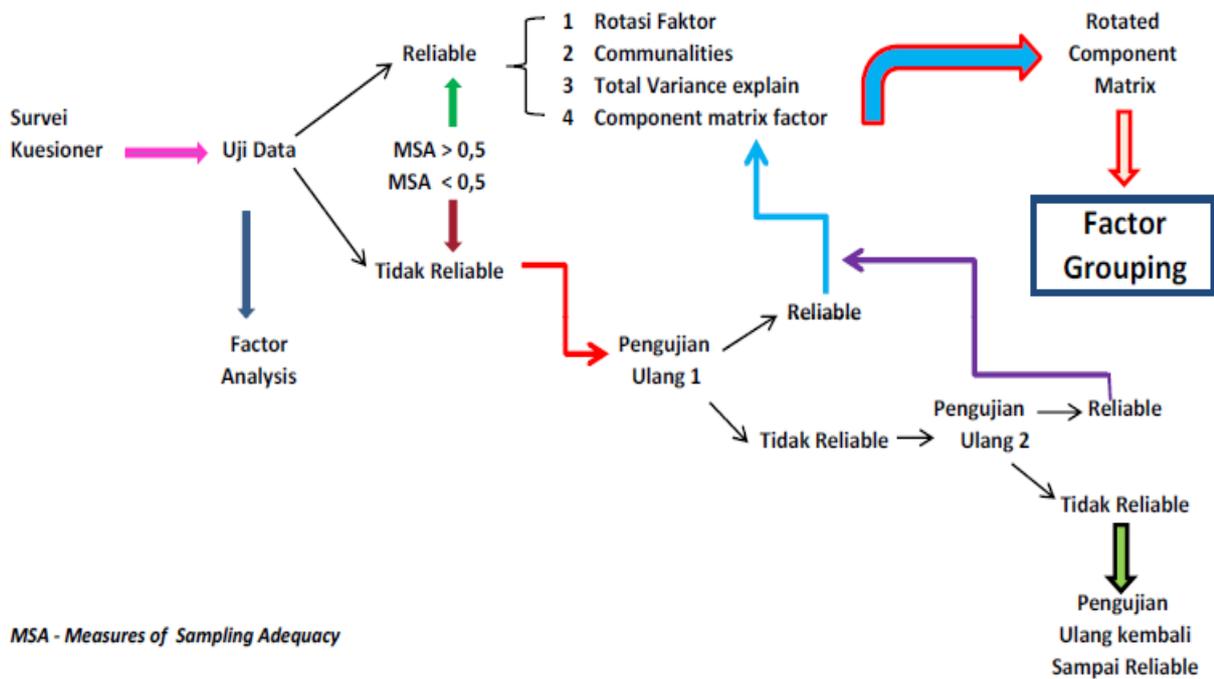
Matriks input Korelasi :

$$S - F_a = c' R^{-1} Z_j .$$

Flowchart Analisis Faktor

Bagan berikut menjelaskan alur atau *flowchart* dari pengujian analisis faktor dalam penelitian, mulai dari pengumpulan data melalui kuesioner, uji data, pengukuran kecukupan sampel, masalah realibilitas sampai ke *factor grouping*. (lihat, gambar 3.2)

Gambar 3.2. Flowchart Analisis Faktor



Hasil dan Pembahasan

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perusahaan swasta yang terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia/BEI yang bergerak di bidang penyediaan jasa pembangunan infrastruktur, badan - badan atau agensi pemerintah yang berhubungan atau memiliki kewe-

nangan dalam bidang penanaman modal, perencanaan pembangunan, lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. BUMN yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur diikutsertakan pula dalam penelitian ini, bersama konsultan yang masuk kategori *Big Four* (lihat, *table 4.1*)

Tabel 4.1 Obyek Penelitian

No.	Institusi	Keterangan
1.	Badan Koordinasi Penanaman Modal- BKPM	Agensi Pemerintah
2.	PT INDIKA ENERGY	Swasta
3.	PT ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk	Swasta
4.	PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN Tbk	BUMN
5.	ERNST & YOUNG	Konsultan
6.	SIDHARTA CONSULTING	Konsultan
7.	PT WIJAYA KARYA	BUMN
8.	PT JASA MARGA Tbk	BUMN
9.	PT INDOSAT Tbk	BUMN
10.	PT TELKOM Tbk	BUMN
11.	PKPS - BAPPENAS	Agensi Pemerintah
12.	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)	BUMN
13.	PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk	BUMN
14.	PT PALYJA	Joint Venture
15.	LKPP	Agensi Pemerintah
16.	PT NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk	Swasta
17.	PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK	BUMN
18.	PRICE WATERHOUSE COOPERS	Konsultan
19.	DELOITTE	Konsultan

Pemilihan obyek penelitian dilakukan karena karakteristik institusi atau lembaga tersebut mengetahui atau mempunyai pengalaman

mengenai kerjasama pemerintah swasta (PPP). *Database* secara lengkap mengenai perusahaan/ institusi serta konsultan yang terlibat proyek

PPP di Indonesia tidak tersedia secara lengkap dan memerlukan penelitian pendalaman yang lebih lanjut. Adapun PPP Book yang dikeluarkan BAPPENAS tahun 2009 hanya memuat tentang

ringkasan dari proyek - proyek infrastruktur yang ditawarkan. Berikut ringkasan dan jumlah proyek infrastruktur yang ditawarkan atau tersedia di Indonesia :

Tabel 4.2 Ringkasan Proyek PPP Infrastruktur di Indonesia

SUMMARY OF PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIPS INFRASTRUCTURE PROJECTS IN INDONESIA			
I. PROJECT READY FOR OFFER			
No	Sector/Sub-sector	Quantity	Project Cost (US\$ 000)
1	Land Transportation	0	-
2	Marine Transportation	1	24,000
3	Air Transportation	0	-
4	Railways	2	1,440,000
5	Toll Road	3	1,000,000
6	Water Resources	0	-
7	Water Supply	1	54,000
8	Solid Waste and Sanitation	0	-
9	Telecommunication	0	-
10	Power	1	2,000,000
11	Oil and Gas	0	-
Total		8	4,518,000
II. PRIORITY PROJECTS			
No	Sector/Sub-sector	Quantity	Project Cost (US\$ 000)
1	Land Transportation	0	-
2	Marine Transportation Air	0	-
3	Air Transportation	0	-
4	Railways	0	-
5	Toll Road	8	2,474,000
6	Water Resources	0	-
7	Water Supply	8	500,000
8	Solid Waste and Sanitation	2	120,000
9	Telecommunication	0	-
10	Power	0	-
11	Oil and Gas	0	-
Total		18	3,094,000
III. POTENTIAL PROJECTS			
No	Sector/Sub-sector	Quantity	Project Cost (US\$ 000)
1	Land Transportation	1	5,000
2	Marine Transportation	5	1,012,000
3	Air Transportation	3	1,416,500
4	Railways	13	10,520,000
5	Toll Road	21	11,774,000
6	Water Resources	0	-
7	Water Supply	11	105,000
8	Solid Waste and Sanitation	0	-
9	Telecommunication	0	-
10	Power	7	1,695,000
11	Oil and Gas	0	-
Total		61	26,527,500
TOTAL INVESTMENT		87	34,139,500

Sumber : PPP Infrastructure Projects in Indonesia (BAPPENAS, 2009)

Pembahasan Hasil Survey

Survey dengan kuesioner dilakukan tahun 2011 melalui pos yang dialamatkan kepada institusi/lembaga yang terdaftar didalam sampel penelitian. Waktu untuk mendapat jawaban dari kuesioner sekitar 4 bulan yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2011. Ada

17 faktor *positif* dan 14 faktor *negative* yang digunakan sebagai faktor kunci kesuksesan (CSF). Teknik *sampling* yang digunakan untuk pengumpulan data dari survey adalah *convenience sampling*, karena Indonesia tidak ada standar atau memiliki tentang *database* dari institusi yang terlibat PPP.

Tabel 4.3 Sebaran Kuesioner

Publik	Frekwensi	Persentase
Agensi	25	16,89%

	BUMN	65	43,92%
Swasta	Perusahaan	18	12,16%
	Konsultan	32	21,62%
Lainnya		8	5,41%
Total		148	100,00%

Sumber : Data primer (diolah)

Tabel 4.4 Kuesioner Yang Kembali

Publik	Distribusi	Menjawab	Persentase Kembali
	Agensi	25	6,08%
	BUMN	65	18,24%
Swasta	Perusahaan	18	2,70%
	Konsultan	32	0,00%
Lainnya		8	0,00%
Total		148	27,03%

Sumber : Data primer (diolah)

Analisis Faktor

Analisis *reliability* diperlukan untuk menguji konsistensi secara internal dari variabel data survey. *Alpha Cronbach's* untuk faktor positif adalah 0,733 dan 0,801 untuk faktor negatif. Nilai dari *alpha cronbach's* ini lebih tinggi dari 0,700, angka yang dipakai sebagai pedoman untuk melakukan riset, pengukuran prediksi atau pengukuran hipotesis (Bing et. al, 2005 : 135) dan data survey tersebut *reliable* untuk analisis *critical factor* (Norusis, 1992).

Analisis faktor adalah suatu analisis data untuk mengetahui faktor - faktor yang dominan dalam menjelaskan suatu masalah. Analisis Faktor dapat dipandang sebagai perluasan analisis komponen utama yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan sejumlah kecil faktor yang memiliki sifat - sifat :

1. Mampu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data,
2. Faktor - faktor tersebut saling bebas, dan
3. Tiap - tiap faktor dapat diinterpretasikan.

Analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi :

- 1) Mengekstraks variabel *latent* dari indikator, atau mereduksi *observable* variabel menjadi variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit,
- 2) Mempermudah interpretasi hasil analisis, sehingga didapatkan informasi yang realistik dan sangat berguna.
- 3) Pemetaan dan Pengelempokkan obyek berdasarkan karakteristik faktor tertentu.

Menilai Variabel Yang Layak

Analisisnya :

- Hipotesis untuk signifikansi adalah :
Ho = Sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut
H1 = Sampel (variabel) telah memadai untuk dianalisis lebih lanjut
- Kriteria dengan melihat probabilitas :
- Angka sig > 0.05 maka Ho diterima
- Angka sig < 0.05 maka Ho ditolak
- Angka MSA (*measure of sampling adequacy*) berkisar 0 sampai 1 dengan kriteria :
- MSA = 1, variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel lain.
- MSA > 0,5, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- MSA < 0,5, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.

Faktor Yang Dianggap Positif (*Positive Attractiveness Factors*) Dalam Penentu Kesuksesan KPS

Berikut hasil pengujian data dari kuesioner dengan menggunakan SPSS V.17.0, data yang digunakan berjumlah 40 dengan 17 pertanyaan dan memakai alpha 5%. Hasil pengujian menunjukkan sebagai berikut :

Pengujian Pertama Faktor Yang Dianggap Positif

Berikut adalah hasil pertama dari pengujian faktor yang dianggap positif, yang ditunjukkan dalam table 4.6.

**Tabel 4.6 Pengujian Pertama Faktor Yang Dianggap Positif
KMO and Bartlett's Test**

<i>Kaiser - Meyer - Olkin</i>	<i>Measure of Sampling Adequacy.</i>	.568
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Approx. Chi - Square</i>	413.040
	<i>Df</i>	136
	<i>Sig.</i>	.000

Analisis :

1. Angka KMO dan *Bartlett's test* adalah 0,568 dengan signifikansi 0,000. Maka Ho ditolak artinya Sampel (variabel) te-

lah memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Oleh karena angka tersebut sudah di atas 0,5 dan signifikansi jauh di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Tabel 4.7 Anti Image Matrices Faktor Yang Dianggap Positif

<i>Anti Image Correlation</i>	<i>MSA</i>	<i>Keterangan</i>
P1	.410	Tidak bisa dianalisis lbh lanjut
P2	.431	Tidak bisa dianalisis lbh lanjut
P3	.621	Bisa dianalisis
P4	.582	Bisa dianalisis
P5	.545	Bisa dianalisis
P6	.559	Bisa dianalisis
P7	.543	Bisa dianalisis
P8	.734	Bisa dianalisis
P9	.541	Bisa dianalisis
P10	.552	Bisa dianalisis
P11	.485	Tidak bisa dianalisis lbh lanjut
P12	.589	Bisa dianalisis
P13	.397	Tidak bisa dianalisis lbh lanjut
P14	.495	Tidak bisa dianalisis lbh lanjut
P15	.675	Bisa dianalisis
P16	.648	Bisa dianalisis
P17	.436	Tidak bisa dianalisis lbh lanjut

Sumber : Hasil SPSS diolah

2. *Anti Image matrices*, untuk *output* dibagian bawah (*anti image correlation*) khususnya pada angka korelasi bertanda a (arah diagonal dari kiri atas kekanan bawah). Antara lain yaitu (lihat, table.4.7) :
 - MSA pada variabel transparansi dalam proses *procurement* (P1) adalah $0,410 < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.
 - MSA pada variabel proses *procurement* yang kompetitif (P2), adalah $0,431 < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.
 - MSA pada variabel transfer risiko dialihkan ke pihak swasta (P3) adalah $0,621 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel pembatasan biaya untuk pemeliharaan (P4), adalah $0,582 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel pengurangan biaya administrasi sektor publik (P5), adalah $0,545 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.

- MSA pada variabel mereduksi dana publik dalam penanaman modal (P6), adalah $0,559 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- MSA pada variabel keterbatasan anggaran dalam sektor publik (P7), adalah $0,543 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- MSA pada variabel keterbatasan dana dari pemerintah (P8), adalah $0,734 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- MSA pada variabel pengurangan biaya proyek (P9), adalah $0,541 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- MSA pada variabel mengembangkan pembangunan (P10), adalah $0,552 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- MSA pada variabel mempercepat pembangunan proyek (P11), adalah $0,485 < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.
- MSA pada variabel menghemat waktu dalam pelaksanaan proyek (P12), adalah $0,589 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- MSA pada variabel meningkatkan pemeliharaan (P13), adalah $0,397 < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.
- MSA pada variabel pengembangan ekonomi daerah yang menguntungkan (P14), adalah $0,495 < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.
- MSA pada variabel alih teknologi ke perusahaan lokal (P15), adalah $0,675 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- MSA pada variabel membuat fasilitas kreatif dan inovatif (P16) adalah $0,648 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- MSA pada variabel pengembangan ekonomi daerah yang menguntungkan (P14), adalah $0,495 < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.
- MSA pada variabel solusi terintegrasi dari pemerintah (P17), adalah $0,436 < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.

Terdapat beberapa variabel yang mempunyai MSA di bawah 0,5 maka yang dikeluarkan adalah variabel dengan MSA terkecil yaitu : variabel P1,P2,P11,P13,P14 dan P17. Selanjutnya akan diadakan pengujian ulang.

Pengujian Ulang (1) Faktor Yang Dianggap Positif

Berikut adalah hasil pertama dari pengujian faktor yang dianggap positif, yang ditunjukkan dalam table 4.8.

Tabel 4.8 Pengujian Ulang (1) Faktor Yang Dianggap Positif
KMO and Bartlett's Test

<i>Kaiser - Meyer - Olkin</i>	<i>Measure of Sampling Adequacy.</i>	.733
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Approx. Chi - Square</i>	262.495
	<i>Df</i>	55
	<i>Sig.</i>	.000

Hasil pengujian ulang pertama dengan mengeluarkan variabel P1,P2,P11,P13,P14 dan P17 dapat dilihat sebagai berikut (table 4.9) :

Analisis :

1. Angka KMO dan *Bartlett's test* adalah 0,733

dengan signifikansi 0,000.

Maka H_0 ditolak artinya Sampel (variabel) telah memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Oleh karena angka tersebut sudah di atas 0,5 dan signifikansi jauh di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Tabel 4.9 Anti Image Correlation Faktor Yang Dianggap Positif ke 2

<i>Anti Image Correlation</i>	<i>MSA</i>	<i>Keterangan</i>
P3	.828	Bisa dianalisis
P4	.769	Bisa dianalisis

P5	.619	Bisa dianalisis
P6	.556	Bisa dianalisis
P7	.624	Bisa dianalisis
P8	.862	Bisa dianalisis
P9	.548	Bisa dianalisis
P10	.742	Bisa dianalisis
P12	.729	Bisa dianalisis
P15	.857	Bisa dianalisis
P16	.767	Bisa dianalisis

Sumber : Hasil SPSS diolah

2. *Anti Image matrices*, untuk *output* di bagian bawah (*anti image correlation*) khususnya pada angka korelasi bertanda a (arah diagonal dari kiri atas ke kanan bawah). Antara lain yaitu :
- MSA pada variabel transfer risiko dialihkan ke pihak swasta (P3) adalah $0,828 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel pembatasan biaya untuk pemeliharaan (P4), adalah $0,769 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel pengurangan biaya administrasi sektor publik (P5), adalah $0,619 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel mereduksi dana publik dalam penanaman modal (P6), adalah $0,556 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel keterbatasan anggaran dalam sektor publik (P7), adalah $0,624 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel keterbatasan dana dari pemerintah (P8), adalah $0,862 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel pengurangan biaya proyek (P9), adalah $0,548 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel mengembangkan pembangunan (P10), adalah $0,742 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel menghemat waktu dalam pelaksanaan proyek (P12), adalah $0,729 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel alih teknologi ke perusahaan lokal (P15), adalah $0,857 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel membuat fasilitas kreatif dan inovatif (P16) adalah $0,767 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- Terlihat semua variabel telah mempunyai MSA di atas 0,5 sehingga variabel transfer risiko dialihkan ke pihak swasta (P3), pembatasan biaya untuk pemeliharaan (P4), pengurangan biaya administrasi sektor publik (P5), mereduksi dana publik dalam penanaman modal (P6), keterbatasan anggaran dalam sektor publik (P7), keterbatasan dana dari pemerintah (P8), pengurangan biaya proyek (P9), mengembangkan pembangunan (P10), menghemat waktu dalam pelaksanaan proyek (P12), alih teknologi ke perusahaan lokal (P15), membuat fasilitas kreatif dan inovatif (P16) dapat dianalisis lebih lanjut.

Analisis Faktor (2) Factoring dan Rotasi Faktor Yang Dianggap Positif

Setelah variabel dapat dianalisis lebih lanjut maka proses selanjutnya akan dilakukan analisis faktor (2) untuk mengetahui apakah variabel tersebut bisa direduksi menjadi satu atau lebih faktor, analisisnya sebagai berikut :

Communalities Faktor Yang Dianggap Positif
Tabel 4.10 Communalities

	<i>Initial</i>	<i>Extraction</i>
P3	1.000	.768
P4	1.000	.530
P5	1.000	.834
P6	1.000	.713
P7	1.000	.646
P8	1.000	.837

P9	1.000	.744
P10	1.000	.804
P12	1.000	.781
P15	1.000	.705
P16	1.000	.868

Extraction Method : Principal, Component Analysis.

Communalities pada dasarnya adalah jumlah varians (bisa dalam persentase) dari suatu variabel mula - mula yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada.

- Untuk variabel transfer risiko dialihkan ke pihak swasta (P3) adalah 0,768 atau sekitar 76,8% varians dari P3 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel pembatasan biaya untuk pemeliharaan (P4), adalah 0,530 atau sekitar 53% varians dari P4 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel pengurangan biaya administrasi sektor publik (P5), adalah 0,834 atau sekitar 83,4% varians dari P5 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel mereduksi dana publik dalam penanaman modal (P6), adalah 0,713 atau sekitar 71,3% varians dari P6 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel keterbatasan anggaran dalam sektor publik (P7), adalah 0,646 atau sekitar 64,6% varians dari P7 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel keterbatasan dana dari pemerintah (P8), adalah 0,837 atau sekitar 83,7%

variens dari P8 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.

- Untuk variabel pengurangan biaya proyek (P9), adalah 0,744 atau sekitar 74,4% varians dari P9 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel mengembangkan pembangunan (P10), adalah 0,804 atau sekitar 80,4% varians dari P10 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel menghemat waktu dalam pelaksanaan proyek (P12), adalah 0,781 atau sekitar 78,1% varians dari P12 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel alih teknologi ke perusahaan lokal (P15), adalah 0,705 atau sekitar 70,5% varians dari P15 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel membuat fasilitas kreatif dan inovatif (P16) adalah 0,868 atau sekitar 86,8% varians dari P16 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.

Semakin besar *communalities* maka semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Faktor pembentuk : dapat dilihat pada *table component matrix*, ada 3 komponen yang berarti ada 3 faktor yang terbentuk. (lihat, *table 4.13*)

Total Variance Explained Faktor Yang Dianggap Positif

Berikut adalah hasil *total variance explained* dari pengujian faktor yang dianggap positif, yang ditunjukkan dalam *table 4.11*.

Tabel 4.11 Total Variance Explained Faktor Yang Dianggap Positif

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.470	40.633	40.633	4.470	40.633	40.633
2	2.531	23.012	63.645	2.531	23.012	63.645

3	1.229	11.169	74.814	1.229	11.169	74.814
4	.838	7.614	82.428			
5	.506	4.598	87.026			
6	.431	3.920	90.946			
7	.352	3.202	94.148			
8	.242	2.201	96.349			
9	.157	1.431	97.780			
10	.141	1.280	99.060			
11	.103	.940	100.000			

Extraction Method : Principal Component Analysis.

Ada 11 variabel (*component*) yang dimasukkan dalam analisis faktor, yakni variabel P3, P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P12,P15,P16. Masing - masing variabel mempunyai varians 1 maka totalnya adalah 11. Jika kesepuluh variabel tersebut diringkas menjadi satu faktor, maka varians yang bisa dijelaskan oleh satu faktor tersebut adalah (lihat kolom *component* untuk *component* = 1).

$$4,470/11 \times 100\% = 40,633\%$$

Jika 11 variabel diekstrak menjadi 3 faktor, maka :

1. Varians faktor pertama adalah 40,633%
2. Varians faktor kedua adalah $2,531/11 \times 100\% = 23,012\%$
3. Varians faktor ketiga adalah $1,229/11 \times 100\% = 11,169\%$

Total kedua faktor akan bisa menjelaskan $40,633\% + 23,012\%$ atau $63,645\%$ dari variabilitas kesebelas variabel asli tersebut. Sedangkan jika ditambah faktor ketiga maka $63,645\% + 11,169\%$ atau $74,814\%$ akan bisa menjelaskan dari variabilitas kesebelas variabel asli tersebut.

Untuk *eigen values* menunjukkan kepentingan *relative* masing - masing faktor dalam menghitung varians kesebelas variabel yang dianalisis. Antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah angka *eigen values* untuk kesebelas variabel adalah sama dengan total varians kesebelas variabel, atau $4,470 + 2,531 + \dots + 0,103 = 11$.
2. Susunan *eigen values* selalu diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil dengan kriteria bahwa angka *eigen values* di bawah 1 tidak digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk.

Dari table 4.11 di atas terlihat bahwa hanya 3 faktor yang terbentuk, karena dengan satu faktor, angka *eigen values* di atas 1, dengan dua faktor *eigen values* juga masih di atas 1 yakni 4,470 dan 2,531. Dengan tiga faktor, angka *eigen*

values masih di atas 1, yakni 1.229. Tetapi ada 8 faktor yang angka *eigen values* di bawah 1, yakni 0.838, sehingga proses *factoring* seharusnya berhenti pa-da 3 faktor saja.

Component Matrix Faktor Yang Dianggap Positif

Berikut adalah hasil *component matrix factors* dari pengujian faktor yang dianggap positif, yang ditunjukkan dalam table 4.12.

Tabel 4.12 Component Matrix Faktor Yang Dianggap Positif

	Component value		
	Factor 1	Factor 2	Factor 3
P3	-.606	.342	.532
P4	.678	.257	.062
P5	-.119	.905	-.019
P6	.260	.779	-.193
P7	.509	.388	-.487
P8	.912	.016	.072
P9	-.048	.818	.270
P10	.763	-.282	.376
P12	.764	-.080	-.436
P15	.783	.114	.281
P16	.829	-.057	.421

Extraction Method : Principal Component Analysis.
a. 3 components extracted.

Setelah diketahui bahwa tiga faktor adalah jumlah yang paling optimal, maka *table component matrix* menunjukkan distribusi kesebelas variabel tersebut pada tiga faktor yang terbentuk. Sedangkan angka - angka yang ada pada *table* tersebut adalah *factor loadings*, yang menunjukkan besar korelasi antara suatu variabel dengan faktor 1, faktor 2 atau faktor 3. Proses penentuan variabel mana yang akan masuk ke faktor yang mana, dilakukan dengan melakukan perbandingan besar korelasi pada setiap baris.

❖ Korelasi antara variabel transfer risiko dialih-

- kan ke pihak swasta (P3) dengan faktor 1 adalah - 0,606 (kuat karena di atas 0,5 dan hubungan terbalik)
- ❖ Korelasi antara variabel transfer risiko dialihkan ke pihak swasta (P3) dengan faktor 2 adalah 0,342 (lemah karena di bawah 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel transfer risiko dialihkan ke pihak swasta (P3) dengan faktor 3 adalah 0,532 (kuat karena di atas 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel pembatasan biaya untuk pemeliharaan (P4) dengan faktor 1 adalah 0,678 (kuat karena di atas 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel pembatasan biaya untuk pemeliharaan (P4) dengan faktor 2 adalah 0,257 (lemah karena di bawah 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel pembatasan biaya untuk pemeliharaan (P4) dengan faktor 3 adalah 0,062 (lemah karena di bawah 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel pengurangan biaya administrasi sektor publik (P5) dengan faktor 1 adalah - 0,119 (lemah karena di bawah 0,5 dan hubungan terbalik)
 - ❖ Korelasi antara variabel pengurangan biaya administrasi sektor publik (P5) dengan faktor 2 adalah 0,905 (kuat karena di atas 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel pengurangan biaya administrasi sektor publik (P5) dengan faktor 3 adalah - 0,019 (lemah karena di bawah 0,5 dan hubungan terbalik)
 - ❖ Korelasi antara variabel mereduksi dana publik dalam penanaman modal (P6) dengan faktor 1 adalah 0,260 (lemah karena di bawah 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel mereduksi dana publik dalam penanaman modal (P6) dengan faktor 2 adalah 0,905 (kuat karena di atas 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel mereduksi dana publik dalam penanaman modal (P6) dengan faktor 3 adalah - 0,193 (lemah karena di bawah 0,5 dan hubungan terbalik)
 - ❖ Korelasi antara variabel keterbatasan anggaran dalam sektor publik (P7) dengan faktor 1 adalah 0,509 (kuat karena di atas 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel keterbatasan dana dari pemerintah (P8) dengan faktor 1 adalah 0,912 (kuat karena di atas 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel keterbatasan dana dari pemerintah (P8) dengan faktor 2 adalah 0,016 (lemah karena di bawah 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel keterbatasan dana dari pemerintah (P8) dengan faktor 3 adalah 0,072 (lemah karena di bawah 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel pengurangan biaya proyek (P9) dengan faktor 1 adalah - 0,048 (lemah karena di bawah 0,5 dan hubungan terbalik)
 - ❖ Korelasi antara variabel pengurangan biaya proyek (P9) dengan faktor 2 adalah 0,818 (kuat karena di atas 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel pengurangan biaya proyek (P9) dengan faktor 3 adalah 0,270 (lemah karena di bawah 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel mengembangkan pembangunan (P10) dengan faktor 1 adalah 0,763 (kuat karena di atas 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel mengembangkan pembangunan (P10) dengan faktor 2 adalah - 0,282 (lemah karena di bawah 0,5 dan hubungan terbalik)
 - ❖ Korelasi antara variabel mengembangkan pembangunan (P10) dengan faktor 3 adalah 0,376 (lemah karena di bawah 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel menghemat waktu dalam pelaksanaan proyek (P12) dengan faktor 1 adalah 0,764 (kuat karena di atas 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel menghemat waktu dalam pelaksanaan proyek (P12) dengan faktor 2 adalah - 0,080 (lemah karena di bawah 0,5 dan hubungan terbalik)
 - ❖ Korelasi antara variabel menghemat waktu dalam pelaksanaan proyek (P12) dengan faktor 3 adalah - 0,436 (lemah karena di bawah 0,5 dan hubungan terbalik)
 - ❖ Korelasi antara variabel alih teknologi ke perusahaan lokal (P15) dengan faktor 1 adalah 0,783 (kuat karena di atas 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel alih teknologi ke perusahaan lokal (P15) dengan faktor 2 adalah 0,114 (lemah karena di bawah 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel alih teknologi ke perusahaan lokal (P15) dengan faktor 3 adalah 0,281 (lemah karena di bawah 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel membuat fasilitas kreatif dan inovatif (P16) dengan faktor 1 adalah 0,829 (kuat karena di atas 0,5)
 - ❖ Korelasi antara variabel membuat fasilitas kreatif dan inovatif (P16) dengan faktor 2 adalah - 0,057 (lemah karena di bawah 0,5 dan hubungan terbalik)
 - ❖ Korelasi antara variabel membuat fasilitas kreatif dan inovatif (P16) dengan faktor 3 adalah 0,421 (lemah karena di bawah 0,5)
- Korelasi antara variabel faktor yang lemah karena di bawah 0,5 dan tanda (-) minus menunjukkan adanya arah korelasi. Oleh kare-

na masih ada variabel (seperti P3, P7) yang belum jelas akan dimasukkan ke dalam akan dimasukkan ke dalam faktor 1,2 atau 3, maka perlu dilakukan proses rotasi (*rotation*), agar semakin jelas perbedaan sebuah variabel yang akan dimasukkan pada faktor 1, 2 atau 3.

Hubungan antara Factor Loading dan Communalities Faktor Yang Dianggap Positif

Communalities adalah jumlah kuadrant masing - masing *factor loading* sebuah variabel. Sebagai contoh untuk variabel P1 :

- $Communalities = (-0,606)^2 + (0,342)^2 + (0,532)^2 = 0,768$ (sama dengan *table communalities* sebelumnya). Demikian seterusnya untuk variabel yang lain.

Berikut adalah hasil *rotated component matrix factors* dari pengujian faktor yang dianggap positif, yang ditunjukkan dalam *table 4.13*.

Tabel. 4.13 Rotated Component Matrix Factor Yang Dianggap Positif

	Component Value		
	Factor 1	Factor 2	Factor 3
P3	-.222	.331	-.780
P4	.594	.275	.319
P5	-.134	.902	-.055
P6	.090	.784	.300
P7	.147	.396	.684
P8	.800	.040	.441
P9	.087	.819	-.257
P10	.852	-.258	.107
P12	.401	-.064	.785
P15	.805	.137	.195
P16	.925	-.032	.104

Extraction Method : Principal Component Analysis.
Rotation Method : Varimax with Kaiser Normalization.
 a. *Rotation converged in 4 iterations.*

Component matrix hasil proses rotasi (*Rotated Component matrix*) memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Terlihat bahwa sekarang *factor loadings* yang dulunya kecil semakin diperkecil, dan *factor loading* yang besar semakin diperbesar.

- ❖ Variabel P3 : korelasi antara P3 dengan faktor 1 yang sebelum rotasi adalah -0,606 (kuat dan hubungan terbalik), dengan rotasi masuk menjadi faktor 3 dengan nilai - 0,708.
- ❖ Variabel P4 : variabel ini masuk faktor 1, karena *factor loading* dengan faktor 1 paling be-

sar 0,594.

- ❖ Variabel P5 : variabel ini masuk faktor 2, karena *factor loading* dengan faktor 2 paling besar 0,902.
- ❖ Variabel P6 : variabel ini masuk faktor 2, karena *factor loading* dengan faktor 2 paling besar 0,784.
- ❖ Variabel P7 : variabel ini masuk faktor 3, karena *factor loading* dengan faktor 3 paling besar 0,684.
- ❖ Variabel P8 : variabel ini masuk faktor 1, karena *factor loading* dengan faktor 1 paling besar 0,800.
- ❖ Variabel P9 : variabel ini masuk faktor 2, karena *factor loading* dengan faktor 2 paling besar 0,819.
- ❖ Variabel P10 : variabel ini masuk faktor 1, karena *factor loading* dengan faktor 1 paling besar 0,852.
- ❖ Variabel P12 : variabel ini masuk faktor 3, karena *factor loading* dengan faktor 3 paling besar 0,785.
- ❖ Variabel P15 : variabel ini masuk faktor 1, karena *factor loading* dengan faktor 1 paling besar 0,805.
- ❖ Variabel P16 : variabel ini masuk faktor 1, karena *factor loading* dengan faktor 1 paling besar 0,925.

Factor Grouping Faktor Yang Dianggap Positif

Dengan demikian kesebelas variabel telah direduksi menjadi hanya terdiri dari tiga (3) faktor yang dikelompokkan *Factor grouping* (lihat, *table 4.14*) :

1. Faktor 1 terdiri atas; P4 (pembatasan biaya pemeliharaan), P8 (keterbatasan dana dari pemerintah), P10 (mengembangkan pembangunan), P15 (alih teknologi ke perusahaan *local*), P16 (membuat fasilitas yang kreatif dan inovatif). Faktor 1 ini akan bisa menjelaskan 40,633% dari variabilitas kesebelas variabel asli tersebut yang terdiri dari 5 sub faktor atau dimensi. Faktor 1 ini dapat dinamakan atau diberi label sebagai faktor teknologi pembangunan yang lebih baik (*represent better technology development*) karena *factor loadings* dari membuat fasilitas yang kreatif dan inovatif (sig = 0,925).
2. Faktor 2 terdiri atas; P3 (risiko ditransfer ke pihak swasta), P7 (menjawab keterbatasan anggaran sektor publik), P12 (menghemat waktu dalam pelaksanaan proyek). Faktor 2 ini akan

bisa menjelaskan 23,012% dari variabilitas sebelas variabel asli tersebut yang terdiri dari 3 sub faktor atau dimensi. Faktor 2 ini dapat dinamakan atau diberi label sebagai faktor solusi anggaran dan transfer risiko (*budget solution and risk transfer*) karena *factor loadings* dari transfer risiko ke pihak swasta ($sig = 0,9020$).

3. Faktor 3 terdiri atas; P5 (mengurangi biaya administrasi sektor publik), P6 (mereduksi dana

publik dalam penanaman modal), P9 (pengurangan biaya proyek). Faktor 3 ini akan bisa menjelaskan 11,169% dari variabilitas sebelas variabel asli tersebut yang terdiri dari 3 sub faktor atau dimensi. Faktor 3 ini dapat dinamakan atau diberi label sebagai *factor* efisiensi pembiayaan sektor *public* (*cost efficiency of public sector*) karena *factor loadings* dari berkurangnya biaya proyek ($sig = 0,7850$).

Tabel. 4.14. Positive Attractiveness Factors

Factor grouping	Factor Label	Component	Component Value		
			Factor 1	Factor 2	Factor 3
Factor 1	Teknologi	Membuat fasilitas yang kreatif dan inovatif	0,9250		
	Pembangunan	Keterbatasan dana dari pemerintah	0,8000		
	Yang lebih baik	Mengembangkan pembangunan	0,8520		
		Alih teknologi ke perusahaan lokal	0,8050		
		Pembatasan biaya untuk pemeliharaan	0,5940		
Factor 2	Solusi Anggaran dan Transfer Risiko	Risiko ditransfer ke pihak swasta		0,9020	
		Keterbatasan anggaran sektor publik		0,7840	
		Menghemat waktu dalam pelaksanaan proyek		0,8190	
Factor 3	Efisiensi	Mengurangi biaya administrasi sektor publik			0,7800
	Pembiayaan	Pengurangan biaya proyek			0,7850
	Sektor Publik	Mereduksi dana publik dalam penanaman modal			0,6840
% Variance			40,633%	23,012%	11,169%
Cumulative % of Variance			40,633%	63,645%	74,814%

Extraction method principal component analysis, rotation method, varimax with kaiser normalization.

Sumber : Hasil SPSS diolah

Component Transformation Matrix Faktor Yang Dianggap Positif

Terlihat angka - angka yang ada pada diagonal, antara *component 1* dengan *1*, *component 2* dengan *component 2* dan *component 3* dengan *component 3*. Terlihat ketiga angka jauh di atas 0,5

yakni (0,835,1, dan 0,835). Hal ini membuktikan ketiga faktor (*component*) yang terbentuk sudah tepat, karena mempunyai korelasi yang tinggi. (lihat, table 4.15)

Tabel.4.15.Component Transformation Matrix Faktor Yang Dianggap Positif

Component Value	Factor 1	Factor 2	Factor 3
1	.835	.026	.550
2	-.027	1.000	-.006
3	.550	.009	-.835

Extraction Method : Principal Component Analysis.

Rotation Method : Varimax with Kaiser Normalization.

Kesimpulan Untuk Faktor Yang Dianggap Positif

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan;

- 1) Dari sebelas variabel yang diteliti, dengan proses *factoring* bisa direduksi menjadi tiga faktor.

- 2) Faktor yang terbentuk :

1. Faktor 1 : terdiri atas pembatasan biaya pemeliharaan, keterbatasan dana dari pemerintah, mengembangkan pembangunan, alih teknologi ke perusahaan lokal, membuat fasilitas yang kreatif dan inovatif. Faktor ini

dapat dinamakan **Faktor Teknologi Pembangunan Yang Lebih Baik.**

2. Faktor 2 terdiri atas; risiko ditransfer ke pihak swasta, menjawab keterbatasan anggaran sektor publik dan menghemat waktu dalam pelaksanaan proyek. Faktor ini dapat dinamakan **Faktor Solusi Anggaran dan Transfer Risiko**
3. Faktor 3 terdiri atas; mengurangi biaya administrasi sektor publik, mereduksi dana publik dalam penanaman modal, dan pengurangan biaya proyek. **Faktor Efisiensi Pembiayaan Sektor Publik**

Strategi Pelaksanaan Kebijakan Untuk Faktor Yang Dianggap Positif

PPP telah dilaksanakan lebih dari 50 tahun lalu, untuk Portugal di sektor jalan toll, di Australia pembangunan komplek olahraga *Sydney Super Dome*, AS dan Inggris untuk proyek infrastruktur lainnya. Upaya Mempercepat pertumbuhan sektor infrastruktur dan konstruksi Pada tahun 2011 Pemerintah berusaha memperbaiki

kondisi infrastruktur dengan meningkatkan anggaran belanja sektor tersebut pada APBN 2011. Apabila dalam APBN untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp 35,2 Triliun, maka pada tahun anggaran 2011 meningkat menjadi Rp 56,5 Triliun.

Proyek infrastruktur yang akan dikerjasamakan (proyek PPP), berharap mendapat dukungan penuh dari Pemerintah. Dukungan dimaksud bisa berupa *risk sharing*, penghapusan atau keringanan pajak, bea maupun tarif, atau pembayaran subsidi. Ini menjadi salah satu solusinya agar investor tetap tertarik untuk terlibat menyediakan berbagai jenis infrastruktur yang ada dan pemerintah dapat menyediakan solusi kebijakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Dari ketiga faktor yang tergrouping yang terdiri dari dimensi - dimensi yang ada, akan menimbulkan dampak. Untuk hal tersebut diperlukan solusi kebijakan yang tepat. Hal ini dapat digambarkan dalam *table 4.16*.

Tabel. 4.16. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Untuk faktor Yang Dianggap Positif

No	Dimensi	Dampak	Solusi Kebijakan	Phak Terkait
Faktor (1) Teknologi Pembangunan yang lebih Baik				
1	Membuat fasilitas yang kreatif dan inovatif	Value for money bagi infrastruktur yang dibangun meningkat	Bekerjasama dengan pihak yangampil dan kompeten	BKPM, PKPS Bappenas
2	Mengembangkan pembangunan	Pemerataan pembangunan di daerah	Otonomi daerah dan mengundang investor ke daerah	Ke mentrian PU, BKPM Ke mentrian Riset
3	Alih teknologi ke perusahaan lokal	Perusahaan mitra atau lokal	Perjanjian pengangkutan	BKPM
4	Kembalian dana dari pemerintah	mendapat pegetahuan /etrampilan	mengajak parti sipasi pihak swasta dlm bentuk PPP	Ke mentrian PU , swasta
5	Pembayaran biaya untuk pemeliharaan	Pembangunan infrastruktur ditambah	Peran swasta yang mengambil alih pemeliharaan dengan membayar biaya	
Faktor (2) Solusi Anggaran dan Transfer Risiko				
1	Risiko ditransfer ke pihak swasta	Penjaminan kewajiban finansial dengan sektor swasta	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PI) lewat guarantee funds	Ke mentrian Keuangan
2	Mengoptimalkan waktu dalam pelaksanaan proyek	Proyek Infrastruktur lebih cepat selesai	Proses perijinan yang mudah dalam satu atap	BKPM
3	Kerjasama anggaran sektor publik	Kurangnya anggaran menyebabkan proyek infrastruktur menjadi terhambat	Mengajak partisipasi pihak swasta dlm bentuk PPP	BKPM
Faktor (3) Efisiensi Pembiayaan Sektor Publik				
1	Pengurangan biaya proyek	Proyek infrastruktur bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif	Pemerintah yang transparan dan akuntabel	LEKPP, KPK, PPATK
2	Mengurangi biaya administrasi sektor publik	Mempertahankan para pelaku usaha dibidang infrastruktur	Debirokrisasi dibidang perijinan	BKPM
3	Mereleksi dana publik dalam penanaman modal	Pemerintah mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak	mengajak partisipasi pihak swasta dlm bentuk PPP	BKPM, PKPS Bappenas

Faktor (1) Teknologi Pembangunan yang lebih Baik terdiri atas :

- a. Membuat fasilitas yang kreatif dan inovatif, merupakan komponen atau dimensi yang pa-

ling signifikan dalam faktor (1). Fasilitas yang kreatif dan inovatif secara makro maupun mikro akan memberi dampak berupa *value for money* bagi infrastruktur yang akan dibangun.

Contoh; kurang maksimalnya daya saing bidang kepelabuhan dan usaha pelayaran nasional. Memerlukan pembangunan infrastruktur dalam langkah memodernisasi sarana dan prasarana bidang pelayaran dan kepelabuhan. Solusi dari kebijakan yang akan diambil adalah bekerjasama dengan pihak yang terampil dan kompeten.

- b. Mengembangkan pembangunan, merupakan dimensi yang signifikan. Dampak dari mengembangkan pembangunan adalah pencapaian proses pengembangan sektor infrastruktur itu sendiri. Pemerataan pembangunan akan terjadi di daerah apabila iklim investasi menjadi sangat menarik dan bisa mendatangkan imbal investasi yang cukup menguntungkan (ROT). Solusi kebijakan yang diambil adalah peran pemerintah daerah menarik investasi lewat otonomi daerah, memberikan kemudahan perijinan, pelayanan yang baik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.
- c. Alih teknologi ke perusahaan lokal, merupakan salah satu isu strategis dimana teknologi yang ditransfer diperlukan untuk pengembangan kemajuan perusahaan yang bermitra dengan pihak lain yang memiliki teknologi lebih maju. Perlunya perjanjian lisensi, pemanfaatan paten dan pelatihan ketrampilan bagi para pekerja diatur dalam regulasi yang cukup menguntungkan kedua belah pihak. Solusi kebijakan ini adalah perjanjian pengikatan (*mutual agreement*).
- d. Keterbatasan dana dari pemerintah, merupakan faktor yang signifikan, dampak dari keterbatasan dana atau anggaran dari pemerintah menyebabkan pembangunan sektor infrastruktur terhambat atau macet karena minimnya anggaran yang tersedia. Solusi kebijakan yang akan diambil adalah melalui meminta keikutsertaan/partisipasi pihak swasta dalam bentuk PPP.
- e. Pembatasan biaya untuk pemeliharaan, ini merupakan alasan klasik yang sering disuarakan, tidak adanya biaya pemeliharaan sehingga infrastruktur publik sering kali diabaikan dan tidak terawat akibatnya fasilitas infrastruktur menjadi rusak dan tidak bisa dipakai. Dengan adanya partisipasi pihak swasta dengan membangun fasilitas infrastruktur bersama, maka diharapkan biaya pemeliharaan bisa diambil alih atau dilakukan *sharing*

cost. Solusi kebijakan ini adalah peran swasta yang mengambil alih pemeliharaan dengan memungut biaya dengan menerima masukan dari berbagai pihak yang terkait.

Factor (2) Solusi Anggaran dan Transfer Risiko terdiri atas :

- a. Risiko ditransfer ke pihak swasta, merupakan dimensi yang paling signifikan dalam faktor (2) ini. Masuknya pendanaan dari swasta untuk sektor infrastruktur di Indonesia melalui peningkatan kelayakan kredit (*credit worthiness*) dan kualitas proyek-proyek PPP infrastruktur. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) dapat memberikan jaminan kepada sektor swasta atas berbagai risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan Pemerintah, khususnya yang dialokasikan kepada *Contracting Agency*, antara lain : keterlambatan atau kegagalan dalam pengadaan tanah, perijinan, lisensi, *financial close*, perubahan peraturan perundangan, wanprestasi baik yang terkait dengan pendapatan, volume atau penjualan, tarif dan lainnya, kegagalan untuk mengintegrasikan proyek dengan jaringan/infrastruktur eksisting, serta risiko terminasi. Solusi dari kebijakan ini adalah pihak swasta mendapat *guarantee funds* lewat PT. PII.
- b. Menghemat waktu dalam pelaksanaan proyek, merupakan dimensi yang signifikan dengan adanya pemotongan jangka waktu kerja maka akan berdampak pada percepatan pengerjaan proyek infrastruktur yang menjadi lebih cepat. Kendala yang paling sering dialami dalam pembangunan proyek infrastruktur adalah perijinan yang lama. Solusi kebijakan adalah memberikan proses perijinan yang mudah dan cepat dalam satu atap.
- c. Keterbatasan anggaran sektor publik, akan berdampak pada proyek infrastruktur yang menjadi terhambat karena tidak adanya alokasi anggaran yang cukup. Pemerintah menawarkan proyek infrastruktur kepada swasta dengan skema *public private partnerships* (PPP) senilai Rp 311 triliun, untuk kurun waktu 2009 - 2011 (KPS, 2008 Nop). Untuk memenuhi alokasi anggaran infrastruktur sebesar 6% terhadap produk domestik bruto (PDB), tawaran proyek infrastruktur KPS juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Solusi kebijakan adalah mengajak partisipasi pihak swasta dalam bentuk PPP.

Faktor (3) Efisiensi pembiayaan sektor publik terdiri atas :

- a. Pengurangan biaya proyek, merupakan dimensi yang paling signifikan dalam faktor label (3) ini. Dampak pengurangan biaya proyek adalah penghilangan biaya yang membentangi dan tidak perlu dampaknya proyek infrastruktur bisa dilaksanakan secara efisien dan lebih efektif. Solusi kebijakan ini adalah *procurement* yang transparan dan akuntabel.
- b. Mengurangi biaya administrasi sektor publik, tingginya biaya administrasi sektor publik akan membuat inefisiensi dalam penanganan proyek infrastruktur. Dengan berkurangnya biaya administrasi diharapkan dapat memperlancar kegiatan para pelaku usaha di bidang infrastruktur.
- c. Mereduksi dana publik dalam penanaman modal, dampak dari mengurangi anggaran pe-

merintah dengan mengalihkan kepada pihak swasta akan membantu kestabilan neraca keuangan pemerintah. Investasi akan masuk dan terlebih lagi dana publik tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan bagi orang tak mampu atau penanganan bencana alam. Solusi kebijakan mengajak partisipasi pihak swasta dalam bentuk PPP.

Faktor Yang Dianggap Negatif Dalam Penentu Kesuksesan KPS

Berikut hasil pengujian data dari kuesioner dengan menggunakan SPSS V.17, data yang digunakan berjumlah 40 dengan 14 pertanyaan dan memakai alpha 5%. Hasil pengujian menunjukkan sebagai berikut :

Pengujian Pertama Faktor Yang Dianggap Negatif

Tabel 4.17 Pengujian Pertama Faktor Yang Dianggap Negatif
KMO and Bartlett's Test

<i>Kaiser - Meyer - Olkin</i>	<i>Measure of Sampling Adequacy.</i>	.604
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Approx. Chi - Square</i>	419.662
	<i>Df</i>	91
	<i>Sig.</i>	.000

Analisis :

1. Angka KMO dan *Bartlett's test* adalah 0,604 dengan signifikansi 0,000. Maka H_0 ditolak artinya Sampel (variabel) telah memadai un-

tuk dianalisis lebih lanjut. Oleh karena angka tersebut sudah di atas 0,5 dan signifikansi jauh di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Tabel 4.18 Anti Image Matrices Faktor Yang Dianggap Negatif

<i>Anti Image Correlation</i>	MSA	Keterangan
N1	.181	Tidak bisa dianalisis lbh lanjut
N2	.606	Bisa dianalisis
N3	.289	Tidak bisa dianalisis lbh lanjut
N4	.736	Bisa dianalisis
N5	.733	Bisa dianalisis
N6	.569	Bisa dianalisis
N7	.700	Bisa dianalisis
N8	.430	Tidak bisa dianalisis lbh lanjut
N9	.726	Bisa dianalisis
Ni0	.83i	Bisa dianalisis
Nii	.725	Bisa dianalisis
Ni2	.572	Bisa dianalisis
N13	.437	Tidak bisa dianalisis lbh lanjut
Ni4	.708	Bisa dianalisis

Sumber : Hasil SPSS diolah

2. *Anti image matrices*, untuk *output* di bagian bawah (*anti image correlation*) khususnya pada angka korelasi bertanda a (arah diagonal dari kiri atas ke kanan bawah). Antara lain yaitu (lihat, *table 4.18*) :
- MSA pada variabel keterlibatan pemerintah dalam penjaminan (N1) adalah $0,181 < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.
 - MSA pada variabel Kurangnya pengalaman dan kemampuan yang cukup (N2) adalah $0,606 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel Restriksi yang berlebihan dalam pengerjaan proyek (N3) adalah $0,289 < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.
 - MSA pada variabel Biaya keikutsertaan yang tinggi (N4), adalah $0,736 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel Risiko tinggi bila mengandalkan pihak swasta (N5), adalah $0,733 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel Adanya keterlambatan karena perdebatan politik (N6), adalah $0,569 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel Adanya keterlambatan karena proses negosiasi (N7), adalah $0,700 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel Mengurangi akuntabilitas

- pada proyek (N8), adalah $0,430 < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.
- MSA pada variabel kesempatan kerja yang ditawarkan jauh lebih sedikit (N9), adalah $0,726 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- MSA pada variabel lama dalam penyusunan kontrak transaksi (N10), adalah $0,831 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- MSA pada variabel inflasi yang tinggi (N11), adalah $0,725 < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.
- MSA pada variabel suku bunga yang tinggi (N12), adalah $0,527 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- MSA pada variabel perubahan keanggotaan di legislatif (N13), adalah $0,437 < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.
- MSA pada variabel penentangan oleh masyarakat (N14), adalah $0,708 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.

Terdapat beberapa variabel yang mempunyai MSA di bawah 0,5 maka yang dikeluarkan adalah variabel dengan MSA terkecil yaitu : variabel N1,N3,N8, dan N13, Selanjutnya akan diadakan pengujian ulang.

Pengujian Ulang (1) Faktor Yang Dianggap Negatif

Tabel 4.19 Pengujian Ulang (1) Faktor Yang Dianggap Negatif
KMO and Bartlett's Test

<i>Kaiser – Meyer – Olkin</i>	<i>Measure of Sampling Adequacy.</i>	.801
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Approx. Chi - Square</i>	271.447
	<i>Df</i>	45
	<i>Sig.</i>	.000

Hasil pengujian ulang pertama dengan mengeluarkan variabel N1,N3,N8, dan N13 dapat dilihat sebagai berikut (*table 4.20*) :

Analisis :

1. Angka KMO dan *Bartlett's test* adalah 0,801 dengan signifikansi 0,000. Maka H_0 ditolak

artinya Sampel (variabel) telah memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Oleh karena angka tersebut sudah di atas 0,5 dan signifikansi jauh di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Tabel 4.20 Anti Image Matrices Faktor Yang Dianggap Negatif

<i>Anti Image Correlation</i>	MSA	Keterangan
N2	.806	Dapat dianalisis
N4	.717	Dapat dianalisis
N5	.925	Dapat dianalisis
N6	.775	Dapat dianalisis
N7	.802	Dapat dianalisis
N9	.845	Dapat dianalisis
N10	.829	Dapat dianalisis
N11	.772	Dapat dianalisis
N12	.668	Dapat dianalisis
N14	.925	Dapat dianalisis

Sumber : Hasil SPSS diolah

2. *Anti Image matrices*, untuk *output* di bagian bawah (*anti image correlation*) khususnya pada angka korelasi bertanda a (arah diagonal dari kiri atas ke kanan bawah). Antara lain yaitu :
- MSA pada variabel Kurangnya pengalaman dan kemampuan yang cukup (N2), adalah $0,806 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel Biaya keikutsertaan yang tinggi (N4), adalah $0,717 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel Risiko tinggi bila mengandalkan pihak swasta (N5), adalah $0,925 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel Adanya keterlambatan karena perdebatan politik (N6), adalah $0,775 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel Adanya keterlambatan karena proses negosiasi (N7), adalah $0,802 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel kesempatan kerja yang ditawarkan jauh lebih sedikit (N9), adalah $0,845 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel lama dalam penyusunan kontrak transaksi (N10), adalah $0,829 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel inflasi yang tinggi yang tinggi (N11), adalah $0,772 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
 - MSA pada variabel suku bunga yang tinggi (N12), adalah $0,668 > 0,5$, variabel masih bisa

- diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut.
- MSA pada variabel adanya penentangan dari masyarakat (N14), adalah $0,925 > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut

Terlihat semua variabel telah mempunyai MSA di atas 0,5 sehingga variabel variabel Kurangnya pengalaman dan kemampuan yang cukup (N2), Biaya keikutsertaan yang tinggi (N4), Risiko tinggi bila mengandalkan pihak swasta (N5), Adanya keterlambatan karena perdebatan politik (N6), Adanya keterlambatan karena proses negosiasi (N7), kesempatan kerja yang ditawarkan jauh lebih sedikit (N9), lama dalam penyusunan kontrak transaksi (N10), inflasi yang tinggi yang tinggi (N11), suku bunga yang tinggi (N12), adanya penentangan dari masyarakat (N14) dapat dianalisis lebih lanjut.

Analisis Faktor (2) Factoring dan Rotasi Faktor Yang Dianggap Negatif

Setelah variabel dapat dianalisis lebih lanjut maka proses selanjutnya akan dilakukan analisis faktor (2) untuk mengetahui apakah variabel tersebut bisa direduksi menjadi satu atau lebih faktor, analisisnya sebagai berikut :

Berikut adalah hasil kedua dari pengujian *factor* yang dianggap positif, yang ditunjukkan dalam *table* 4.23.

Communalities Faktor Yang Dianggap Negatif

Tabel 4.21 Communalities Faktor Yang Dianggap Negatif

	<i>Initial</i>	<i>Extraction</i>
N2	1.000	.699
N4	1.000	.452
N5	1.000	.535
N6	1.000	.621
N7	1.000	.791
N9	1.000	.730
N10	1.000	.519
N11	1.000	.919
N12	1.000	.866
N14	1.000	.566

Extraction Method : Principal Component Analysis.

Communalities pada dasarnya adalah jumlah varians (bisa dalam persentase) dari suatu variabel mula-mula yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada.

- Untuk variabel kurangnya pengalaman dan kemampuan yang cukup (N2) adalah 0,699 atau sekitar 69,9% varians dari N2 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel biaya keikutsertaan yang tinggi (N4) adalah 0,452 atau sekitar 45,2% varians dari N4 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel risiko tinggi bila mengandalkan pihak swasta (N5), adalah 0,535 atau sekitar 53,5% varians dari N5 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel adanya keterlambatan karena perdebatan politik (N6) adalah 0,621 atau se-

- kitar 62,1% varians dari N6 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel adanya keterlambatan karena proses negosiasi (N7) adalah 0,791 atau sekitar 79,1% varians dari N7 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel kesempatan kerja yang ditawarkan jauh lebih sedikit (N9) adalah 0,730 atau sekitar 73,0% varians dari N9 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel lama dalam penyusunan kontrak transaksi (N10) adalah 0,519 atau sekitar 51,9% varians dari N10 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel inflasi yang tinggi yang tinggi (N11) adalah 0,919 atau sekitar 91,9% varians dari N11 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel suku bunga yang tinggi (N12) adalah 0,866 atau sekitar 86,6% varians dari N12 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
- Untuk variabel adanya penentangan dari masyarakat (N14), adalah 0,566 atau sekitar 56,6% varians dari N14 dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.

Semakin besar communalities maka semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Faktor pembentuk : dapat dilihat pada *table component matrix*, ada 3 komponen yang berarti ada 3 faktor yang terbentuk. (lihat, *table 4.23*)

Total Variance Explained Faktor Yang Dianggap Negatif

Tabel 4.22 Total Variance Explained Faktor Yang Dianggap Negatif

<i>Component</i>	<i>Initial Elgenvalues</i>			<i>Extraction Sums of Squared Loadings</i>		
	<i>Total</i>	<i>% of Variance</i>	<i>Cumulative %</i>	<i>Total</i>	<i>% of Variance</i>	<i>Cumulative %</i>
1	5.393	53.933	53.933	5.393	53.933	53.933
2	1.305	13.047	66.980	1.305	13.047	66.980
3	.998	9.985	76.965			
4	.720	7.196	84.161			
5	.500	5.004	89.165			
6	.437	4.374	93.539			
7	.247	2.470	96.009			
8	.215	2.150	98.159			
9	.130	1.302	99.460			
10	.054	.540	100.000			

Extraction Method : Principal Component Analysis.

Ada 10 variabel (*component*) yang dimasukkan dalam analisis faktor, yakni variabel N2, N4, N5, N6, N7, N9, N10, N11, N12, N14. Masing-masing variabel mempunyai varians 1 maka totalnya adalah 10. Jika kesepuluh variabel tersebut diringkas menjadi satu faktor, maka varians yang bisa dijelaskan oleh satu faktor tersebut adalah (lihat kolom *component* untuk *component* = 1).

$$5,393/10 \times 100 \% = 53,933 \%$$

Jika 10 variabel diekstrak menjadi 2 faktor, maka :

1. Varians faktor pertama adalah 53,933 %
2. Varians faktor kedua adalah $1,3051/10 \times 100\% = 13,047 \%$

Total kedua faktor akan bisa menjelaskan $53,933\% + 13,047\%$ atau $66,980\%$ dari variabilitas kesepuluh variabel asli tersebut.

Untuk *eigen values* menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varians kesebelas variabel yang dianali-

sis. Antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah angka *eigen values* untuk kesebelas variabel adalah sama dengan total varians kesebelas variabel, atau $5,393 + 1,3051 + \dots + 0,054 = 10$.
2. Susunan *eigen values* selalu diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil dengan kriteria bahwa angka *eigen values* di bawah 1 tidak digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk.

Dari table 4.22 di atas terlihat bahwa hanya 2 faktor yang terbentuk, karena dengan satu faktor, angka *eigen values* di atas 1, dengan dua faktor *eigen values* juga masih di atas 1 yakni 5,393 dan 1,3051. Tetapi ada 8 faktor yang angka *eigen values* di bawah 1, yakni 0,988, sehingga proses *factoring* seharusnya berhenti pada 2 faktor saja.

Component Matrix Faktor Yang Dianggap Negatif

Tabel 4.23 *Component Matrix* Faktor Yang Dianggap Negatif

	<i>Component Value</i>	
	<i>Factor 1</i>	<i>Factor 2</i>
N2	.741	.387
N4	.583	-.334
N5	.663	.308
N6	.562	.553
N7	.847	.272
N9	.851	-.079
N10	.709	.127
N11	.913	-.292
N12	.674	-.641
N14	.718	-.225

Extraction Method : Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.

Setelah diketahui bahwa dua faktor adalah jumlah yang paling optimal, maka *table component matrix* menunjukkan distribusi kesepuluh variabel tersebut pada dua faktor yang terbentuk. Sedangkan angka - angka yang ada pada tabel tersebut adalah faktor *loadings*, yang menunjukkan besar korelasi antara suatu variabel dengan faktor 1, faktor 2. Proses penentuan variabel mana yang akan masuk ke faktor yang mana, dilakukan dengan melakukan perbandingan besar korelasi pada setiap baris.

❖ Korelasi antara variabel kurangnya pengalaman dan kemampuan yang cukup (N2) de-

ngan faktor 1 adalah 0,741 (kuat karena di atas 0,5)

- ❖ Korelasi antara variabel kurangnya pengalaman dan kemampuan yang cukup (N2) dengan faktor 2 adalah 0,387 (lemah karena di bawah 0,5)
- ❖ Korelasi antara variabel biaya keikutsertaan yang tinggi (N4) dengan faktor 1 adalah 0,583 (kuat karena di atas 0,5)
- ❖ Korelasi antara variabel biaya keikutsertaan yang tinggi (N4) dengan faktor 2 adalah - 0,334 (lemah karena di bawah 0,5 dan hubungan terbalik)

- ❖ Korelasi antara variabel risiko tinggi bila mengandalkan pihak swasta (N5), dengan faktor 1 adalah 0,663 (kuat karena di atas 0,5)
- ❖ Korelasi antara variabel risiko tinggi bila mengandalkan pihak swasta (N5), dengan faktor 2 adalah 0,308 (lemah karena di bawah 0,5)
- ❖ Korelasi antara variabel adanya keterlambatan karena perdebatan politik (N6) dengan faktor 1 adalah 0,562 (kuat karena di atas 0,5)
- ❖ Korelasi antara variabel adanya keterlambatan karena perdebatan politik (N6) dengan faktor 2 adalah 0,553 (kuat karena di atas 0,5)
- ❖ Korelasi antara variabel adanya keterlambatan karena proses negosiasi (N7) dengan faktor 1 adalah 0,847 (kuat karena di atas 0,5)
- ❖ Korelasi antara variabel adanya keterlambatan karena proses negosiasi (N7), dengan faktor 2 adalah 0,272 (lemah karena di bawah 0,5)
- ❖ Korelasi antara variabel kesempatan kerja yang ditawarkan jauh lebih sedikit (N9) dengan faktor 1 adalah 0,851 (kuat karena di atas 0,5)
- ❖ Korelasi antara variabel kesempatan kerja yang ditawarkan jauh lebih sedikit (N9) dengan faktor 2 adalah - 0,079 (lemah karena di bawah 0,5 dan hubungan terbalik)
- ❖ Korelasi antara variabel lama dalam penyusunan kontrak transaksi (N10), dengan faktor 1 adalah 0,709 (kuat karena di atas 0,5)
- ❖ Korelasi antara variabel lama dalam penyusunan kontrak transaksi (N10), dengan faktor 2 adalah 0,127 (lemah karena di bawah 0,5)
- ❖ Korelasi antara variabel inflasi yang tinggi yang tinggi (N11), dengan faktor 1 adalah 0,913 (kuat karena di atas 0,5)
- ❖ Korelasi antara variabel inflasi yang tinggi yang tinggi (N11), dengan faktor 2 adalah - 0,292 (lemah karena di bawah 0,5 dan hubungan terbalik)
- ❖ Korelasi antara variabel suku bunga yang tinggi (N12), dengan faktor 1 adalah 0,674 (kuat karena di atas 0,5)
- ❖ Korelasi antara variabel suku bunga yang tinggi (N12), dengan faktor 2 adalah - 0,641 (kuat karena di bawah 0,5 dan hubungan terbalik)
- ❖ Korelasi antara variabel adanya penentangan dari masyarakat (N14) dengan faktor 1 adalah 0,718 (kuat karena di atas 0,5)
- ❖ Korelasi antara variabel adanya penentangan dari masyarakat (N14), dengan faktor 2 adalah

- 0,225 (lemah karena di bawah 0,5 dan hubungan terbalik)

Rotated Component Matrix Faktor Yang Dianggap Negatif

Tabel 4.24 Rotated Component Matrix Faktor Yang Dianggap Negatif

<i>Rotated Component Matrix^a</i>		
	<i>Component Value</i>	
	<i>Factor 1</i>	<i>Factor 2</i>
N2	.253	.797
N4	.649	.174
N5	.253	.686
N6	.009	.788
N7	.409	.790
N9	.659	.544
N10	.414	.590
N11	.854	.436
N12	.930	.020
N14	.668	.346

Extraction Method : Principal Component Analysis.

Rotation Method : Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component matrix hasil proses rotasi (Rotated Component Matrix) memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Terlihat bahwa sekarang *factor loadings* yang dulunya kecil semakin diperkecil, dan faktor loading yang besar semakin diperbesar.

- ❖ Variabel N2 : korelasi antara N2 dengan faktor 1 yang sebelum rotasi adalah 0,741 (kuat), dengan rotasi masuk menjadi faktor 2 dengan nilai 0,797.
- ❖ Variabel N4 : variabel ini masuk faktor 1, karena *factor loading* dengan faktor 1 paling besar 0,649.
- ❖ Variabel N5 : variabel ini masuk faktor 2, karena *factor loading* dengan faktor 2 paling besar 0,686.
- ❖ Variabel N6 : variabel ini masuk faktor 2, karena *factor loading* dengan faktor 2 paling besar 0,788.
- ❖ Variabel N9 : variabel ini masuk faktor 1, karena *factor loading* dengan faktor 1 paling besar 0,654.
- ❖ Variabel N10 : variabel ini masuk faktor 2, karena *factor loading* dengan faktor 2 paling besar 0,590.
- ❖ Variabel N11 : variabel ini masuk faktor 1, karena *factor loading* dengan faktor 1 paling besar 0,854.

- ❖ Variabel N12 : variabel ini masuk faktor 1, karena *factor loading* dengan faktor 1 paling besar 0,930.
- ❖ Variabel N14 : variabel ini masuk faktor 3, karena *factor loading* dengan faktor 1 paling besar 0,668.

Factor Grouping Faktor Yang Dianggap Negatif

Dengan demikian ke 10 variabel telah direduksi menjadi hanya terdiri dari dua (2) faktor yang dikelompokkan *factor grouping* (lihat, *table 4.25*) :

1. Faktor 1 terdiri atas; biaya keikutsertaan yang tinggi (N4), kesempatan kerja yang ditawarkan jauh lebih sedikit (N9), inflasi yang tinggi yang tinggi (N11), suku bunga yang tinggi (N12), adanya penentangan dari masyarakat (N14). Faktor 1 ini akan bisa menjelaskan 53,933% dari variabilitas kesepuluh variabel asli tersebut yang terdiri dari 5 sub faktor atau dimensi. Faktor 1 ini dapat dinamakan atau diberi label sebagai faktor ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), karena ada-

nya proses *procurement* yang tinggi, inflasi yang tinggi, kesempatan kerja yang minim dan penentangan masyarakat dan *factor loadings* dari suku bunga yang tinggi (sig = 0,9300). Semua ini dapat dikategorikan sebagai ekonomi biaya tinggi.

2. Faktor 2 terdiri atas; kurangnya pengalaman dan kemampuan yang cukup (N2), risiko tinggi bila mengandalkan pihak swasta (N5), adanya keterlambatan karena perdebatan politik (N6), adanya keterlambatan karena proses negosiasi (N7), lama dalam penyusunan kontrak transaksi (N10). Faktor 2 ini akan bisa menjelaskan 13,047% dari variabilitas kesepuluh variabel asli tersebut yang terdiri dari 5 sub faktor atau dimensi. Faktor 2 ini dapat dinamakan atau diberi label sebagai faktor kurangnya pengalaman (*lack of experience*), karena kurang pengalaman dan kemampuan yang cukup, risiko tinggi, perdebatan politik dan proses negosiasi dan lamanya penyusunan kontrak transaksi dan *factor loadings* dari kurangnya pengalaman (sig = 0,7970).

Tabel 4.25 Negatif Attractiveness Factors

Factor Grouping	Factor Label	Component	Component Value	
			Factor 1	Factor 2
Factor 1	Ekonomi Biaya Tinggi	Suku bunga tinggi	0,9300	
		Inflasi tinggi	0,8540	
	Adanya penentangan oleh masyarakat	0,6680		
	Kesempatan kerja yang ditawarkan lebih sedikit	0,6590		
	Biaya keikutsertaan yang tinggi	0,6490		
Factor 2	Kurangnya Pengalaman	Kurang pengalaman dan kemampuan yang cukup		0,7970
		Adanya keterlambatan karena proses negosiasi		0,7900
		Adanya keterlambatan karena perdebatan politik		0,7880
		Risiko tinggi bila mengandalkan swasta		0,6860
		Lamanya penyusunan kontrak transaksi		0,5900
% Variance			53,933%	13,047%
Cumulative % of Variance			53,933%	66,980%

Extraction method principal component analysis, rotation method, varimax with kaiser normalization.

Kesimpulan Untuk Faktor Yang Dianggap Negatif

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan;

- 1) Dari kesepuluh variabel yang diteliti, dengan proses *factoring* bisa direduksi menjadi dua faktor.
- 2) Faktor yang terbentuk :
 1. Faktor 1 : terdiri atas biaya keikutsertaan yang tinggi kesempatan kerja yang ditawarkan jauh lebih sedikit, inflasi yang

tinggi, suku bunga yang tinggi, adanya penentangan dari masyarakat. Faktor ini dapat dinamakan **Faktor Ekonomi Biaya Tinggi**.

2. Faktor 2 terdiri atas : Kurangnya pengalaman dan kemampuan yang cukup, risiko tinggi bila mengandalkan pihak swasta, keterlambatan karena perdebatan politik, Adanya keterlambatan karena proses negosiasi, lama dalam penyusunan kontrak transaksi.

Faktor ini dapat dinamakan **Faktor Kurangnya Pengalaman**.

Strategi Pelaksanaan Kebijakan Untuk Faktor Yang Dianggap Negatif

Peran pemerintah adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor maupun lembaga pembiayaan. Hal ini dilakukan melalui reformasi kebijakan yang memungkinkan liberalisasi industri infrastruktur dengan membuka persaingan, memperkuat kerangka regulasi, menjalankan mekanisme *cost recovery*, mengalokasikan resiko secara optimal, serta memperkuat kelembagaan. Peran pemerintah juga diperlukan dalam masalah pembebasan lahan, dan berperan sebagai mediator sangat membantu dalam me-

ningkatkan kelayakan bisnis investasi ini.

Proyek infrastruktur yang akan dikerjasamakan (proyek PPP), berharap mendapat dukungan penuh dari Pemerintah. Dukungan dimaksud bisa berupa *risk sharing*, penghapusan atau keringanan pajak, bea maupun tarif, atau pembayaran subsidi. Ini menjadi salah satu solusinya agar investor tetap tertarik untuk terlibat menyediakan berbagai jenis infrastruktur yang ada dan pemerintah dapat menyediakan solusi kebijakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Dari kedua faktor yang tergrouping yang terdiri dari dimensi - dimensi yang ada, akan menimbulkan dampak. Untuk hal tersebut diperlukan solusi kebijakan yang tepat. Hal ini dapat digambarkan dalam *table 4.26*.

Tabel 4.26. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Untuk Faktor Yang Dianggap Negatif

No	Dimensi	Dampak	Solusi Kebijakan	Pihak Terkait							
1	Faktor (1) Ekonomi Biaya Tinggi 1. Suku bunga tinggi 2. Inflasi tinggi 3. Adanya penertarikan oleh masyarakat 4. Kesempatan kerja yg ditawarkan lebih sedikit 5. Biaya keikutsertaan yang tinggi	Penyempitan kredit di sektor infrastruktur turun Meningkatnya harga barang dan jasa berdampak pada sektor infrastruktur Realisasi pembangunan jalan td sangat lambat karena harga Tenaga kerja terampil lokal digantikan expatriate Pihak swasta enggan ikut serta	Penurunan suku bunga acuan SBI Penurunan suku bunga acuan SBI Pembuatan UU pembebasan lahan dan harga penawaran yang pantas peningkatan kompetensi dan tenaga kerja tersertifikasi di perkeran Proses procurement yang transparan dan jujur	Bank Indonesia Bank Indonesia Kementerian PU, Hukum dan HAM DPR Menakertrans, BNSP LAPP, KPK, PRA TK							
2					Faktor (2) Kurangnya Pengalaman 1. Kurang pengalaman dan kemampuan yang cukup 2. Adanya ketertarikan karena proses negosiasi 3. Adanya ketertarikan karena perolehan politik 4. Risiko tinggi bila mengabdikan swasta 5. Lamanya penyusunan kontrak transaksi	Sumber daya manusia dengan kapabilitas memadai dan bermotivasi tinggi Identifikasi faktor potensial konflik penduduk dan daerah Diminir konflik elit politik dengan pengatuan koalisi Penetapan <i>Good corporate governance</i> Kapasitas hukum dan pelibatan abkase	Kementerian PU, KPS, Bapenas Kementerian Dalam Negeri, DPRD DPRD DPR Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN lewat PT PPI Kementerian PU, Hukum dan HAM Kementerian Keuangan				
3								Lambatnya proses pembangunan dan ketidakefisienan spesifikasi Terbundanya pengerjaan proyek infrastruktur Anggaran yang kurang tepat, tunun, pembiayaan menjadi mundur Mengengah kegagalan dan distorsi pasar, agar persaingan sehat Transaksi lama, proyek infrastruktur tertunda	Kementerian PU, KPS, Bapenas Kementerian Dalam Negeri, DPRD DPRD DPR Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN lewat PT PPI Kementerian PU, Hukum dan HAM Kementerian Keuangan		
4										Lambatnya proses pembangunan dan ketidakefisienan spesifikasi Terbundanya pengerjaan proyek infrastruktur Anggaran yang kurang tepat, tunun, pembiayaan menjadi mundur Mengengah kegagalan dan distorsi pasar, agar persaingan sehat Transaksi lama, proyek infrastruktur tertunda	Kementerian PU, KPS, Bapenas Kementerian Dalam Negeri, DPRD DPRD DPR Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN lewat PT PPI Kementerian PU, Hukum dan HAM Kementerian Keuangan
5											

Faktor (1) Ekonomi Biaya Tinggi terdiri atas :

- a. Suku bunga tinggi, merupakan dimensi yang paling signifikan dalam *factor* (1) ini, dampak dari tingginya suku bunga akan menyebabkan penyerapan kresit di sektor infrastruktur turun. tingginya karena pelaku usaha cenderung menggunakan dananya sendiri untuk menghindari pinjaman mahal. Solusi kebijakan dari kebijakan ini adalah penurunan suku bunga SBI dan kestabilan bidang moneter
- b. Inflasi tinggi, adanya inflasi yang tinggi menyebabkan meningkatnya harga barang dan jasa, kelangkaan atas barang yang ada di pasaran akan berdampak semakin membengkaknya biaya pembangunan infrastruktur. Solusi kebijakan adalah penurunan suku bunga acuan SBI, dan ketersediaan produk infrastruktur di pasaran seperti; besi beton, rangka baja, semen dan lainnya.
- c. Adanya penentangan oleh masyarakat, ini merupakan isu strategis yang berdampak pada realisasi pembangunan infrastruktur, sebagai contoh realisasi pembangunan jalan tol sangat lambat karena masalah pembebasan lahan dan ketidakcocokan harga yang ditawarkan. Solusi kebijakan adalah; pencegahan tindakan spekulasi dari para calo tanah dan pembuatan UU pembebasan lahan, serta pemberian harga yang pantas.
- d. Kesempatan kerja yang ditawarkan lebih sedikit, dimensi ini merupakan isu strategis. Kesempatan kerja menjadi lebih sedikit ketika tenaga handal terampil dan tersertifikasi kurang tersedia sehingga berdampak pada masuknya tenaga kerja asing (*expatriate*) yang menggantikan lapangan kerja yang seharusnya bisa diisi oleh tenaga kerja lokal/domestik.
- e. Biaya keikutsertaan yang tinggi, biaya keikutsertaan yang tinggi akan berdampak pada enggangan pihak swasta untuk ikut serta. Banyaknya biaya yang tidak jelas akan membawa pada ketidakefisienan yang selanjutnya membuat perusahaan menjadi tidak kompetitif. Solusi kebijakan ini adalah proses *procurement* yang transparan dan jujur.

Faktor (2) Kurangnya Pengalaman terdiri atas :

- a. Kurang pengalaman dan kemampuan yang cukup, merupakan dimensi yang paling signifikan untuk *factor* ini. Dampak yang dapat ditimbulkan antara lain lambatnya proses pembangunan dan ketidaksesuaian spesifikasi

- yang bisa memperpendek umur dari proyek infrastruktur. Solusi kebijakan adalah menciptakan atau mendapatkan sumber daya manusia dengan kapasitas memadai dan bermotivasi tinggi.
- b. Adanya keterlambatan dalam proses negosiasi, akan berdampak tertundanya pengerjaan proyek infrastruktur. Negosiasi menjadi panjang ketika konflik tidak bisa diselesaikan. Solusi kebijakan adalah identifikasi faktor potensial konflik penduduk dan daerah.
- c. Adanya keterlambatan karena perdebatan politik, perdebatan politik yang lama dan berlarut - larut dari legislatif untuk memutuskan suatu kebijakan akan berdampak pada anggaran yang terserap lambat turun, sehingga pembiayaan menjadi mundur tanpa kepastian. Solusi kebijakan adalah eliminir konflik elit dengan penguatan kemitraan atau koalisi.
- d. Risiko tinggi bila mengandalkan pihak swasta, dampak dari risiko ini adalah apabila terjadi distorsi pasar dan persaingan menjadi tidak sehat sehingga masyarakat dapat dirugikan. Solusi dari kebijakan ini adalah penerapan *good corporate governance*.
- e. Lamanya penyusunan kontrak transaksi, dampaknya yang ditimbulkan dari penyusunan kontrak yang lama akan membuat mundur jangka waktu pengerjaan sehingga proyek infrastruktur tertunda. Solusi kebijakan adalah kepastian hukum dan pelibatan arbitrase ketika ada konflik terjadi.

Kesimpulan

Dalam rangka pengembangan infrastruktur di Indonesia, pemerintah menggunakan model kerjasama pemerintah dan swasta (KPS), untuk kerjasama ini diduga banyak permasalahan yang dihadapi antara lain faktor - faktor penentu kesuksesan/*critical success factors* (CSF) dan apakah faktor - faktor penentu kesuksesan sebagai suatu solusi. Untuk itu telah dilakukan penelitian, yang menggambarkan mengenai faktor yang dianggap positif dan faktor yang dianggap negatif.

1. Faktor yang dianggap Positif (*Positive Attractiveness Factors*) adalah :

- 1) Teknologi Pembangunan Yang Lebih Baik
Faktor ini terdiri dari komponen pembatasan biaya pemeliharaan, keterbatasan dana dari pemerintah, mengembangkan pembangunan, alih teknologi ke perusahaan lokal, membuat fasilitas yang kreatif dan inova-

tif. Untuk mendapat teknologi pembangunan yang lebih baik, maka perlu bekerjasama dengan pihak yang terampil dan kompeten. Selain itu peran otonomi daerah dalam mengundang investor masuk, adanya perjanjian pengikatan dalam kebijakan KPS, dan mengajak partisipasi pihak swasta, dalam mengambil alih pemeliharaan melalui pengelolaan biaya.

- 2) Solusi Anggaran dan Transfer Risiko, Faktor ini terdiri dari komponen, risiko yang ditransfer ke pihak swasta, solusi atas keterbatasan anggaran sektor publik dan menghemat waktu dalam pelaksanaan proyek. Risiko yang ditransfer ke pihak swasta antara lain berupa, penjaminan kewajiban finansial sektor swasta diarahkan lewat *Guarantee funds* oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Sedangkan untuk menghemat waktu dalam pelaksanaan proyek infrastruktur salah satu caranya adalah mempermudah proses perijinan dalam satu atap, serta mengajak partisipasi pihak swasta dalam pendanaan proyek.
- 3) Efisiensi Pembiayaan Sektor Publik Faktor ini terdiri dari komponen, mengurangi biaya administrasi sektor publik, mereduksi dana publik dalam penanaman modal, dan pengurangan biaya proyek. Agar proyek infrastruktur bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif maka proses *procurement* harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu debirokratisasi juga diperlukan untuk memangkas prosedur perijinan yang terlalu panjang dan rumit.

2. Faktor yang dianggap Negatif (*Negative Attractiveness Factors*) adalah :

- 1) Ekonomi Biaya Tinggi. Faktor ini terdiri dari komponen, biaya keikutsertaan yang tinggi, kesempatan kerja yang ditawarkan jauh lebih sedikit, inflasi yang tinggi yang tinggi, suku bunga yang tinggi, serta adanya penentangan dari masyarakat. Untuk memangkas ekonomi biaya tinggi diperlukan kebijakan yang tepat sasaran di bidang moneter, membuat aturan yang ketat untuk mengawasi transaksi keuangan yang bersifat spekulatif, penurunan suku bunga acuan SBI, memperkuat cadangan devisa. Sedangkan untuk peningkatan kompetensi dari tenaga kerja perlu pelatihan khusus untuk tenaga

kerja yang nantinya akan tersertifikasi menurut kompetensi yang diambil. Faktor lain perlu dikedepankan proses *procurement* yang transparan dan jujur, serta sosialisasi mengenai pengadaan proyek yang intensif, program, kemanfaatan yang ada bagi masyarakat sehingga penentangan dari masyarakat berkurang.

2) Kurangnya Pengalaman

Faktor ini terdiri dari komponen, kurangnya pengalaman dan kemampuan yang cukup, risiko tinggi bila mengandalkan pihak swasta, keterlambatan karena perdebatan politik. Adanya keterlambatan karena proses negosiasi, lama dalam penyusunan kontrak transaksi. Lambatnya proses pembangunan dan ketidaksesuaian spesifikasi diatasi dengan sumber daya manusia dengan kapasitas memadai. Tertundanya pengerjaan proyek karena lambatnya proses negosiasi para pihak diperlukan pemetaan, identifikasi faktor potensial konflik penduduk dan daerah. Sedangkan untuk proses perdebatan politik yang panjang dan anggaran yang lambat terserap dapat dieliminir dengan penguatan koalisi diantara para politisi. Di sisi lain penerapan *good corporate governance*, jaminan stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan kepastian hukum mutlak adanya.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zaenal., "Kebijakan Publik", Suara Bebas, Jakarta, 2006.
- Akintoye, A., Beck, M., Cliff, H., Chinyio, E. And Asenova, D., "The Financial Structure of Private Finance Initiative Projects", Vol. 1, pp. 361-369, *Proceedings : 17th ARCOM Annual Conference, Salford*, 2001.
- _____, et al, "Perception of Positive and Negatif Factors Influencing The Attractiveness of PPP/PFI Procurement For Construction Projects in The UK", Vol.12, No.2.hlm.133, *Engineering, Construction and Architectural Management*, 2005.
- Allan, J., "Public Private Partnerships : A Review of Literature and Practice"- *Public Policy Paper*

- No.4, *Saskatchewan Institute of Public Policy, Saskatchewan, 1999.*
- Arthur Andersen and Enterprise LSE., "Value For Money Drivers In the Private Financial Initiative, The Treasury Task Force", http://www.treasury-projects-taskforce.gov.uk/series_I/Andersen/tech_contents.html, 2000.
- Aziz, A.M.A, "Successful delivery of Public-Private Partnerships for infrastructure development", Vol.133(12), 918-931, *Journal of Construction Engineering and Management*, 2007.
- Bennett, E., "Public-private cooperation in the delivery of urban infrastructure services (water and waste)", PPPUE Background Paper, UNDP/Yale Collaborative Programme, available at; www.undp.org/pppue/ , 1998.
- Boynton, A.C. and Zmud, W, "An Assessment of Critical Success Factors", Vol. 25 No. 4, pp. 17-27, *MIT Sloan Management Review*, 1984
- Brotherton, B. and Shaw, J., "Towards an identification and classification of critical success factors in UK hotels plc", Vol. 15 No. 2, pp. 113-35, *International Journal of Hospitality Management*, 1996.
- Carrick, M., "Commercial Debt Raising for PFI Projects, Ernst & Young UK, Corporate Finance", London, available at : www.budget.news.co.uk/Template1.nsf/Homepages , 2000.
- Cheung, Esther., Albert P.C. Chan, and Stephen Kajewski, "Suitability of procuring large public works by PPP in Hong Kong", Vol. 17 No. 3, hlm. 292-308, *Engineering, Construction and Architectural Management*, 2010.
- Chua, D.K.H., Kog, Y.C. and Loh, P.K., "Critical success factors for different project objectives", Vol. 125 No. 3, pp. 142 - 50, *Journal of Construction Engineering and Management*, 1999.
- David, Fred R, "Strategic Management : Concepts & Cases", 13th Ed, Prentice Hall, 2011.
- Dedy S Priatna, "Strategy For Developing Infrastructure PPP in Indonesia", 42nd Annual Meeting Board of Governors - Asian Development Bank Bali, 5 May 2009, 2009.
- Dictionary.com., "Public sector", *The American Heritage* © *New Dictionary of Cultural Literacy*, [http://dictionary.reference.com/browse/Public sector.](http://dictionary.reference.com/browse/Public+sector.), 2005.
- European Commission Directorate, "Guidelines for Successful Public-Private Partnerships", February, Version 1, Directorate-General Regional Policy, European Commission, Brussels, 2003.
- Ezulike, E.I., Perry, J.G. and Hawash, K., "The Barriers to Entry into the PFI market", Vol. 4 No. 3, pp. 179-193, *Engineering, Construction and Architectural Management*, 1997.
- Frilet, M., "Some Universal Issues in BOT Projects For Public Infrastructure", Vol.14 (4), hlm. 499 - 512, *The International Construction Law Review*, 1997.
- Grant, T., "Keys to Successful Public Private Partnerships", Vol.23 (3), hlm.27 - 28, *Canadian Business Review* 1996.
- Grunert, K.G. and Ellegaard, C., "The concept of key success factors : theory and method", in Baker, M.J. (Ed.), Vol. 3, Wiley, Chichester, pp. 245-74, *Perspectives on Marketing Management*, 1992.
- Gunningan, "Increasing the Efficiency and Effectiveness of PPP in the Irish Construction Industry", Dissertation, University of Salford, Salford, UK., 2007.
- Gunawan Adji, "The Smart Handbook of Public Private Partnerships, Konsep dan Praktik Meningkatkan Investasi di Sektor Infrastruktur", hlm.36, Rene Publisher, Jakarta, 2010.
- Guynes, C. S. and Vanecek, M. T., "Critical success factors in data management," *Information and Management* 30(4), July 1996, pp. 201-209.

- Hammami, Mona, Ruhashyankiko, Jean-Francois, and Yehoue, Etienne B., "Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure", IMF Working Paper, WP106199, 2006.
- Hambros, S.G., "Public-Private Partnerships for Highways : Experience, Structure, Financing, Applicability and Comparative Assessment", Council of Deputy Ministers Responsible for Transportation and Highway Safety, Ottawa, 1999.
- Hardcastle, C., Edwards, P.J., Akintoye, A.Q. And Li, B., "Critical Success Factors For PPP/PFI Projects in The UK Construction Industry : A Factor Analysis Approach", Working Paper, hlm. 4, 2002.
- Harian Seputar Indonesia, "Pemerintah Terus Pacu Infrastruktur", 27 Sept, hlm. 13., 2010.
- _____, "Pemerintah Janji Benahi Infrastruktur", 21 Sept, hlm. 14., 2010.
- Hubeis, Musa dan Mukhamad Najib., "Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi", Elex Media Computindo, Jakarta, 2008.
- Husein Umar, "Riset Strategi Perusahaan", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- _____, "Metode Riset Ilmu Administrasi", Gramedia, Jakarta, 2004.
- _____, "Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah", Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Jane Broadbent dan Richard Laughin, "Private Public Partnerships : An Introduction", Vol. 16, hlm. 332, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, 2003.
- Jauch, Lawrence R, dan William F Glueck., "Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan", (terjemahan), Erlangga, Jakarta, 1998.
- Jeffries, M., Gameson, R and Rowlinson, S., "Critical Success factors of The BOOT Procurement System : Reflection From The Stadium Australia Case Study", Vol. 9(4), hlm. 3252-361, *Engineering, Construction and Architectural Management*, 2002.
- Jeffries, Marcus., "Critical Success factors of Public Private Partnerships A case study of The Sydney Superdome", Vol.13, No.5, hlm.452, *Engineering, Construction and Architectural Management*, 2006.
- John Adams Napier, Alistair Young Paisley, and Wu Zhihong, "Public private partnerships in China System, constraints and future prospects", Vol. 19 No. 4, pp. 384-396, *International Journal of Public Sector Management*, 2006
- Jones, I., Zamani, H. and Reehal, R., "Financing Models for New Transport Infrastructure", OPEC, Luxembourg, 1996.
- Kanter, R.M., "From Spare Change to Real Change", *Harvard Business Review*, Vol.77 (2), hlm.122 - 132, 1999.
- Ke, Yongjian., Xinbo Zhao, Yingying Wang and ShouQing Wang, "SWOT analysis of Domestic Private Enterprises in Developing Infrastructure Projects in China", Vol. 14, No. 2, hlm. 152 - 170, *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 2009.
- Kintanar, N.E.B., Baclagon, M.L.S., Azanza, R.T., and Alzate, R.P., "Locking Private sector Participation Into Infrastructure Development in The Phillippines", No. 72, pp. 37 - 55, *Transport and communication Bulletin For asia and The Pasific*, 2003.
- Kopp, J.C, "Private Capital For public Works : Designing The Next generation franchise For Public private Partnerships in Transportation Infrastructure", Thesis, Department of Civil Engineering, Northwestern University, USA., 1997.
- Li, B., Akintoye, A., Edwards, P.J. and Hardcastle, C, "Critical success factors for PPP/ PFI projects in the UK construction industry", Vol. 23, pp. 459-467, *Construction Management and Economics*, 2005.

- Maskin, E. and Tirole, J., "Public-private partnerships and government spending limits", Vol. 26, pp. 412-20, *International Journal of Industrial Organization*, 2008.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995.
- Mohr, J and R. Spekman, "Characteristics of Partnership Success : Partnership attributes, Communication Behaviour and Conflict Resolution Technique", Vol.15. hlm.135 - 152, *Strategic Management journal*, 1994.
- Munro, M.C. and Wheeler, B.R, "An opinion . . . comment on critical success factors work", pp. 67 - 68, *MIS Quarterly*, 1980.
- National Audit Office, "Examining the Value for Money of Deals under the Private Finance Initiative", National Audit Office, London, 1999.
- Pallister, J. & Law, J., "A Dictionary of Business and Management", Oxford University Press, Oxford, 2006.
- PERPRES RI No. 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014, Memperkuat Pembangunan Antar Bidang, Buku II.
- Pierce, J. and Little, I., "Tax payers need value from partnerships", 8 April, *Australian Financial Review*, 2002.
- Qiao, L., Wang, S.Q., Tiong, R.LK., and Chan, T.S., "Framework For critical Success Factor of BOT Projects in China", Vol.7 (1), hlm. 53 - 61, *The Journal of Project Finance*, 2001.
- Riyanto, "Penerapan Analisis Multivariat Dalam Penelitian Kesehatan", hlm.102, Nitra Media, Bandung , 2009.
- Rockart, J.F., "The changing role of the information systems executive : a critical success factors perspective", Fall, pp. 3-13, *Sloan Management Review*, 1982.
- Sanvido. V., Grobler, F., Parfitt, K., Guvenis, m, and Goyle, M., "Critical success Factors For construction Projects", *ASCE Journal of Construction Engineering and Management*, Vol. 118, hlm. 94 - 111, 1992.
- Shamas-ur-Rehman Toor and Stephen O. Ogunlana, "Construction professionals perception of critical success factors for large-scale construction projects, Vol. 9 No. 2, hlm. 149-167, *Construction Innovation*, 2009.
- Shank, M. E., Boynton, A. C., and Zmud, R.W., "Critical success factor analysis as a methodology for MIS planning", pp. 121 - 129, *MIS Quarterly* 9(2), June 1985.
- Singgih Santoso, "Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS", hlm. 58, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Sohail, M., "PPP and the Poor in Water and Sanitation - Interim Finds, Engineering, and Development Centre", Loughborough University, Loughborough, 2000.
- Stonehouse, J.H., Hudson, A.R. and O; Keefee, M.J., "Private Public Partnerships : The Toronto Hospital Experience", Vol. 23 (2), hlm. 17 - 20, *Canadian Business Review*, 1996.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Tiong, R.L.K., "CSFs in competitive tendering and negotiation model for BOT projects", Vol. 122 No. 3, pp. 205-11, *Journal of Construction Engineering and Management*, AS-CE, 1996.
- Tiong, R. and Anderson, J.A., "Public-private partnership risk assessment and management process : the Asian dimension", in Akintoye, A., Beck, M. and Hardcastle, C. (Eds), pp. 225-43, *Public Private Partnerships : Managing Risk and Opportunities*, Blackwell, Oxford, 2003.
- Treasury, H.M, "Public Private Partnerships-The Government's Approach", The Stationery Office, London, available at : www.hm-treasury.gov.uk/docs/2000/ppp.html , 2000.
- UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,

UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,

UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi,

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan

UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos

UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistri-
kan.

Webb, R. and Pulle, B., *Public-private partnerships
: An Introduction*", Research Paper No. 1
2002-03, Information and Research Services,
Department of the Parliamentary Library,
Australia, 2002.

World Economic Forum, *"Global Competitiveness
Report 2008-2009"*, 2009.

Yeo, K.T., *"Forging New Project Value Chain -
Paradigm Shift"*, hlm.203 - 211, *Journal of
Management in Engineering*, 1991.